



**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KUALITAS APARATUR  
PEMERINTAH , PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah di KabupatenTegal)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUNIIFAH ANAAN**

**NPM 4316500124**

**Program Studi Akuntansi Fakultas**

**Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2020**



**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KUALITAS APARATUR  
PEMERINTAH , PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**(Studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Pada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

**MUNIIFAH ANAAN**

**NPM 4316500124**

**Program Studi Akuntansi Fakultas**

**Ekonomi Dan Bisnis**

**Universitas Pancasakti Tegal**

**2020**



**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KUALITAS APARATUR  
PEMERINTAH, PEMANFAAAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Oleh :

Muniifah Anaan

NPM: 4316500124

**Disetujui Untuk Ujian Skripsi**

Tanggal: 15 Juli 2020

Dosen Pembimbing I

  
Dr. H. Tabrani, M.M.  
NIDN. 0612126001

Dosen Pembimbing II

  
Subekti, S.E., M.Si  
NIDN. 0618056602

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

  
Amriyah Fariq, S.E., M.Si, Akt  
NIDN. 0618056602  
NIPY. 1385231970

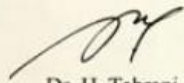
**Pengesahan Skripsi**

Nama : Muniifah Anaan  
NPM : 4316500124  
Judul : Pengaruh Pemahaman Akuntansi Kualitas Aparatur Pemerintah  
Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan  
Keuangan Pemerintah Daerah

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:


Hari : Jum'st  
Tanggal : 17 Juli 2020

Ketua Penguji



Dr. H. Tabrani, M.M  
NIDN. 0612126001

Pengujii I



Subekti, S.E., M.Si  
NIDN. 0618056602

Pengujii II



Teguh Budi R., S.E., M.M  
NIDN. 0615057601

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi



Anindita Fitri, S.E., M.Si., Akt  
NIP. 1385231970

## **MOTTO DAN PEREMBAHAN**

- **MOTTO**

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan Kepada Tuhan, berharaplah.

(QS Al Insyirah: 6-8)

Ketakutan tidak akan menghasilkan apa-apa, justru keberanian akan menghasilkan kejutan-kejutan dalam hidup.

(Hijab Traveller)

- **PERSEMBAHAN**

Ku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Abi Kisnanto (Alm) & Umi Sri Asiyah yang selalu memerikan doa dan semangat
2. Faiq Anan Murobby kakak saya memberikan semangat dan doanya
3. Sahabat-sahabat saya Ukhti Darling (Liviya, Lutfi, Tungga, Ayi, Nadya, Nida, Nopi, Pipit, Bungadan Rosy) yang selalu memerikan semangat tiada hentinya.
4. Almamater Universitas Pancasakti Tegal

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Nama : Muniifah Anaan

NPM : 4316500124

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Pengaruh Pemahaman Akuntansi Kualitas Aparatur Pemreintah Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal)”.

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan/ atau pemalsuan data mau pun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal,

Yang menyatakan,

A green revenue stamp with the text "MATERAI TEMPEL" at the top, "6000" in large numbers, and "ENAM RIBU RUPIAH" at the bottom. A signature is written over the stamp.

Muniifah Anaan

## ABSTRAK

Di negara-negara maju yang memiliki praktik akuntansi yang kompleks kebutuhan terhadap publikasi informasi keuangan merupakan suatu keniscayaan. Bahkan tanpa harus dipaksa pun, institusi bisnis maupun public secara sukarela bersedia menyajikan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting yang terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh positif pemahaman akuntansi, kualitas aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel 48 responden. Data penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner, diproses dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel jenuh. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah uji kualitas data, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis.

Hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas aparatur tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** pemahaman akuntansi, kualitas aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **ABSTRACT**

*In developed countries that have complex accounting practices the need for publication of financial information is a necessity. Even without being forced, business and public institutions are willing to voluntarily present financial reports and disclose important information related to the organization to stakeholders. The purpose of this study was to determine the positive influence of understanding accounting, the quality of government officials, the use of information technology on the quality of local government financial reports.*

*This type of research is a quantitative study with a total of 48 respondents. This research data was collected through a questionnaire, processed and analyzed using multiple regression analysis. The sampling technique used is saturated samples. While the data analysis used is data quality test, descriptive analysis, classical assumption test, and hypothesis testing.*

*The results of this research data indicate that the understanding of accounting has a positive effect on the quality of local government financial statements. The quality of the apparatus does not affect the quality of local government financial statements, and the use of information technology has a positive effect on the quality of local government financial reports.*

**Keywords:** *understanding of accounting, the quality of government apparatus, the use of information technology, the quality of local government financial reports.*



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kualitas Aparatur Pemerintah Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal).

Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi yang sangat berarti kepada;

1. Dr. Dien Noviyani Rahmatika, S.E., M.M.,Akt., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Tabrani, M.M, selaku Dosen Pembimbing 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Subekti, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
4. Kepada kedua orang tua yang telah memberikan semangat dan doa serta materil demi lancarnya penyusunan skripsi ini.

5. Kepada semua pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Tegal, Maret 2020

Penulis,

Muniifah Anaan

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BABI PENDAHULUAN	
A. LatarBelakangMasalah.....	1
B. RumusanMasalah.....	7
C. TujuanPenelitian.....	8
D. ManfaatPenelitian.....	8

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. LandasanTeori.....	10
1. Agency Theory.....	10
2. KuallitasLaporanKeuangan.....	11
3. TujuanLaporanKeuangan.....	14
4. Manfaat laporan keuangan pemerintah daerah .....	16
5. KarakteristikLaporanKeuangan Daerah.....	17
6. Dampak Pelaporan keuangan yang buruk.....	20
7. PenggunaLaporanKeuanganPemerintah Daerah.....	21
8. SikluspengolahanKeuangan Daerah.....	22
9. SistemAkuntansiPemerintah Daerah.....	25
10. PemahamanAkuntansi.....	31
11. KualitasAparaturPemerintah.....	36
12. PemanfaatanTeknologiInformasi.....	40
B. PenelitianTerdahulu.....	43
C. KerangkaPemikiran.....	51
D. PerumusanHipotesis.....	52

## BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenispenelitian.....	53
B. PolulasidanSampel.....	53

C. DefinisiKonseptualdanOperasionalVariabel.....	55
1. DefinisiKonseptual.....	55
2. DefinisiOperasionalVariabel.....	57
D. MetodePengumpulan Data.....	59
E. MetodeAnalisis Data danUjiHipotesis.....	60
1. UjiKualitas Data.....	60
2. UjiAsumsiKlasik.....	61
3. AnalisisRegresi Linier Berganda.....	63
4. UjiHipotesis.....	63
5. KoefisienDeterminasi ( $R^2$ ) .....	64

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. SejarahUmumlokasiPenelitian	
1. SejarahKabupatenTegal.....	65
2. VisidanMisiKabupatenTegal.....	66
3. StrukturOrganisasiKabupatenTegal.....	67
B. HasilPenelitian.....	67
1. Deskriptif Data.....	67
2. Analisis Dan Pengujian Data.....	72
A. UjiKualitas Data.....	72
1. HasilUjiValiditas.....	72
2. HasilUjiReliabilitas.....	74

B. Statistik Deskriptif.....	75
C. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	77
1. Hasil Uji Normalitas.....	77
2. Hasil Uji Multikolinieritas.....	78
D. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	80
E. Hasil Uji Hipotesis.....	82
1. Uji Statistik t (Uji Parsial).....	82
F. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	84
C. Pembahasan.....	85
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
C. Keterbatasan Penelitian.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	96

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1 PenelitianTerdahulu.....	48
3.1 DaftarPopulasi.....	49
3.2 DefinisiOperasionalVariabelDependen .....	53
3.3 DefinisiOperasionalVariabelIndependen.....	54
4.1 DistribusiPenyebaranKuisisioner.....	68
4.2 KarakteristikRespondenBerdasarkanJenisKelamin.....	70
4.3 KarakteristikRespondenBerdasarkan Tingkat Pendidikan .....	71
4.4 KarakteristikRespondenMenurutMasaKerja.....	71
4.5 HasilUjiValiditas .....	73
4.6 HasilUjiRealibilitas .....	75
4.7 HasilAnalisisStastistikDeskriptif .....	76
4.9 HasilUjiNormalitas (UjiStatistik).....	78
4.10 HasilMultikolonieritas .....	79
4.11 HasilAnalisisRegresi Linier Berganda .....	81
4.12 HasilUjiStatistik t (UjiParsial).....	83
4.13 HasilUjiKoefisienDeterminasi .....	85

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>		<b>Halaman</b>
2.1	Lingkarlaporankeuangan yang buruk.....	20
2.2	KerangkaPemikiran.....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Kuesioner .....	97
2. Tabulasi Jawaban Responden .....	103
3. Data Variabel Independen dan Dependen .....	111
4. Uji Validitas .....	113
5. Uji Reliabilitas .....	122
6. Uji Statistik Deskriptif .....	123
7. Uji Asumsi Klasik .....	124
8. Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	125
9. Uji Hipotesis .....	126
10. Uji Koefisien Determinasi .....	127
11. Tanda Izin Pengembalian Data Penelitian .....	130
12. Surat Izin Penelitian .....	139
13. Daftar Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal .....	146

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di negara-negara maju yang memiliki praktik akuntansi yang kompleks kebutuhan terhadap publikasi informasi keuangan merupakan suatu keniscayaan. Bahkan tanpa harus dipaksa pun, institusi bisnis maupun publik secara suka rela bersedia menyajikan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting yang terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*). Hingga saat ini, masih ada sebagian masyarakat kita yang memiliki anggapan bahwa laporan keuangan hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki pengetahuan akuntansi dan keuangan saja, sebab merekalah yang dapat memahami dan menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan. Laporan keuangan disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru untuk membantu mereka dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas (Mahmudi, 2016: 1)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) digunakan oleh pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan diharapkan mempunyai kualitas dengan tingkat karakteristik

yang memadai. Apabila laporan keuangan pemerintah daerah tidak sesuai karakteristik yang memadai, maka akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya, yang nantinya akan berdampak pada kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sumber daya (Juli et al., 2010)

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan oleh suatu entitas pelaporan harus memiliki empat karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Pemerintah daerah dituntut agar pengelolaan keuangan daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*), dimana pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah

dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan(Armel, Nasir, & Safitri, 2017)

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berupa Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas (Diani, 2014).

Seiring perkembangan di bidang keuangan, maka perlu dilakukan perubahan diberbagai bidang untuk mendukung di bidang keuangan dapat berjalan dengan baik. Perubahan tersebut nantinya akan menghasilkan informasi keuangan daerah yang tersedia untuk berbagai pihak digunakan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Salah satu perubahan dibidang akuntansi yang cukup signifikan adalah perubahan di bidang sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah merupakan sistem dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Agar pengelolaan keuangan pemerintah daerah berjalan dengan baik maka tata kelola keuangan tersebut harus dilakukan berdasarkan *good governance* yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Salah satunya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan

pertanggungjawaban keuangan pemerintah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Sri, 2015).

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib dalam administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi, daniel kartika & suhardjo, 2013).

Supaya laporan keuangan pemerintahan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka diharapkan laporan keuangan tersebut harus berkualitas. WTP adalah pendapat yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga laporan keuangan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Nova Sari 2015).

Ada beberapa yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Pemahaman Akuntansi, Menurut Yuliani (2010) rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman akuntansi dari penyusun laporan keuangan itu sendiri, belum diterapkannya secara optimal sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan atau lemahnya peran internal audit. Berdasarkan Kamus Umum

Bahasa Indonesia, seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kualitas aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan dalam hal ini antara lain pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kualitas yang dibutuhkan. Sedikitnya pegawai yang berlatar belakang pendidikan bidang akuntansi menjadikan kurangnya penguasaan aparatur Organisasi Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar (Kholis, 2013).

Pemanfaatan teknologi juga merupakan salah satu yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Komputer dan jaringan merupakan salah satu teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan komputer dan jaringan akan sangat membantu untuk mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tidak kehilangan nilai informasi yaitu tepat waktu. Tepat waktu dalam pelaporan keuangan akan menjadikan nilai informasi menjadi relevan dan laporan keuangan menjadi berkualitas (Andrianto & Rahmawati, 2017)

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya digunakan dalam organisasi sektor swasta tetapi juga dalam organisasi sektor publik, termasuk juga pemerintah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan, disebutkan bahwa untuk menindak lanjuti pelaksanaan proses pembangunan sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, Pemerintah Pusat dan Daerah yang berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan untuk mengelola keuangan, dan mendistribusikan informasi keuangan kepada pelayanan publik (Zubaidi, Cahyono, & Maharani, 2019).

Fenomena tentang laporan keuangan pemerintah saat ini sedang menjadi hal yang menarik untuk dibahas lebih dalam, karena ditemukannya fakta bahwa masih ada penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Indriasih dkk, 2014). Hal tersebut yang menjadikan meningkatnya tuntutan masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Beberapa fenomena yang terjadi pada Provinsi Jawa Tengah yang menjadi catatan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada tahun 2016, peraturan Gubernur Jawa Tengah mengenai ketentuan perjalanan dinas belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

Beberapa penelitian tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah banyak dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya seperti, (Diani, 2014) yang menunjukkan bahwa variabel

Pemahaman Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (LKPD), (Adhi, daniel kartika & suhardjo, 2013) dengan hasil penelitian variabel Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan menurut (Sari, 2016) Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kualitas Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Tegal)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ?
2. Apakah Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ?



3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh positif Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif Kualitas Aparatur Pemerintah terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
3. Untuk mengetahui pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

- b. Bagi Peneliti

Dapat memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi pembaca tentang kualitas laporan keuangan daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Menurut (Santoso, 2015: 5) mendefinisikan *Agency* merupakan ketertarikan hubungan antara dua pihak yang mana pihak satu sering disebut dengan *agent*, yaitu pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan dan atas nama serta dibawah pengawasan pihak lain, yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen.

Faristina 2011, (dalam hakim, 2017) mengatakan pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari pada teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah yang bertindak sebagai agen berkewajiban memaparkan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai partisipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan yang baik, ekonomi, sosial, maupun politik serta baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam suatu pemerintah yang demokrasi, hubungan antara pemerintah dan pengguna informasi keuangan pemerintah dapat digambarkan sebagai hubungan keagenan.

## 2. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan begitu laporan keuangan diharapkan akan membantu bagi para pengguna (*user*) untuk membuat keputusan ekonomi (Munawir, 2014: 22)

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan pemerintah pada saat ini atas dalam suatu periode tertentu. Dalam praktiknya laporan keuangan oleh pemerintah daerah tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun dengan aturan atau standar akuntansi pemerintahan. Hal ini perlu dilakukan, karena agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimaengerti oleh semua pihak baik itu pihak eksternal maupun pihak internal. Pemerintah daerah wajib untuk melaporkan keuangannya pada suatu periode akuntansi. Pelaporan keuangan daerah kemudian diperiksa dan dianalisis oleh BPK sehingga dapat diketahui oleh semua pihak eksternal (Faud, 2016: 5)

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan dapat memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, membingungkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Sari, 2016).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah selama satu periode.

Dari pengertian yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah merupakan sebuah alat yang sangat penting dalam menyediakan sebuah catatan informasi mengenai posisi keuangan yang relevan dan digunakan untuk menggambarkan kinerja sebuah instansi selama periode tertentu.

Menurut Kawatu (2019: 28) jenis laporan keuangan pemerintah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan pos-pos sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, dimana menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

### 4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

### 5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

### 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas

### 3. Tujuan Lapooran Keuangan Daerah

Secara umum tujuan laporan keuangan organisasi sektor publik menurut (Mardiasmo, 2018: 201) yaitu :

#### a. Kepatuhan dan pengelolaan

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dari pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan

#### b. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah diterapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya organisasi.

c. Perencanaan dan Informasi Otoritas

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana.

d. Kelangsungan Organisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi ayau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

e. Hubungan Masyarakat

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organiasai untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi karyawan dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yan berkepentingan.

f. Sumber Fakta dan Gambaran

Laporan keuangan bertujuan untukmemberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa tujuan laporan keuanagan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi laporan keuangan pemerintah yaitu untuk pengembalian



keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- 2) Menyediakan informasi tentang ketaatan realisasi terhadap anggaran.
- 3) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintahan.
- 4) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam aktivitasnya

#### **4. Manfaat laporan keuangan pemerintah daerah**

Kurang dimanfaatkannya laporan keuangan itu karena masih rendahnya budaya akuntabilitas dan budaya membuat laporan keuangan. Penyebab lainnya adalah masih adanya masyarakat yang kurang rasional atau cenderung emosional dalam membuat keputusan ekonomi, social, dan politik. Laporan keuangan akan terasa sekali manfaatnya dikala masyarakat semakin rasional dalam menentukan keputusan ekonomi, social, dan politiknya. Jika laporan keuangan publikasikan itu dieksplorasi dan ditelaah secara kritis, maka pembaca laporan akan dapat menangkap berbagai penting didalamnya. Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan menurut (Mahmudi, 2016: 6) adalah:

- a. Memberikan informasi keuangan untuk meentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitas.
- b. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah terjadi dan akan terjadi.
- c. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lainnya yang disyaratkan.
- d. Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran.
- e. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja menajerial dan organisasional.

## **5. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah daerah harus terus berupaya memperbaiki kualitas laporan keuangannya. Laporan keunga yang disajikan memberikan manfaat bagi pengguna untuk pengambilan keputusan. (Mahmudi, 2016: 11)

karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah sebagai berikut:

### **a. Relevan**

pengguna untuk pengambilan keputusan. Relevansi laporan keuangan terkait dengan :

- 1) Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk memprediksi (*predictive value*), yaitu memprediksi kondisi keuangan, kebutuhan keuangan, dan kinerja di masa datang.
- 2) Laporan keuangan dapat memberikan manfaat untuk evaluasi kinerja masa lalu dan memberikan umpan balik dalam rangka perencanaan keuangan dan perbaikan kinerja di masa datang (*feedback value*).
- 3) Laporan keuangan dipublikasikan tepat waktu (*timeliness*).  
Laporan keuangan yang baik harus disajikan tepat waktu, sebab nilai atau manfaat suatu informasi akan berkurang jika terlambat disampaikan. Contoh sederhana, sebuah koran pagi memiliki nilai manfaat yang lebih besar apabila diterima waktu pagi. Jika koran tersebut diterima sore hari atau keesokan harinya, maka nilai informasi dalam koran akan berkurang. Demikian juga halnya dengan laporan keuangan pemerintah daerah, idealnya dipublikasikan di awal tahun antara bulan Maret-April. Sebagai misal, jika pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangan tahun 2009 pada bulan oktober 2010, maka dapat dikatakan informasi keuangan tersebut sudah terlambat atau basi.

b. Andal (*Reliability*)

Artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat diandalkan, tidak menyesatkan dan mengandung unsur manipulasi.

Laporan keuangan yang andal memiliki ciri- ciri sebagai berikut :

- 1) Disajikan secara jujur (*faithfulness of presentation*), yaitu laporan keuangan terbebas dari salah saji material dan tidak ada manipulasi laporan keuangan.
- 2) Dapat diverifikasi (*verifiability*), yaitu informasi dalam laporan keuangan dapat diverifikasi kebenarannya melalui proses audit laporan keuangan.
- 3) Netral dalam penyajian (*neutrality*), yaitu penyajian laporan keuangan tidak bersifat tendensius dan bias terhadap kepentingan kelompok tertentu.

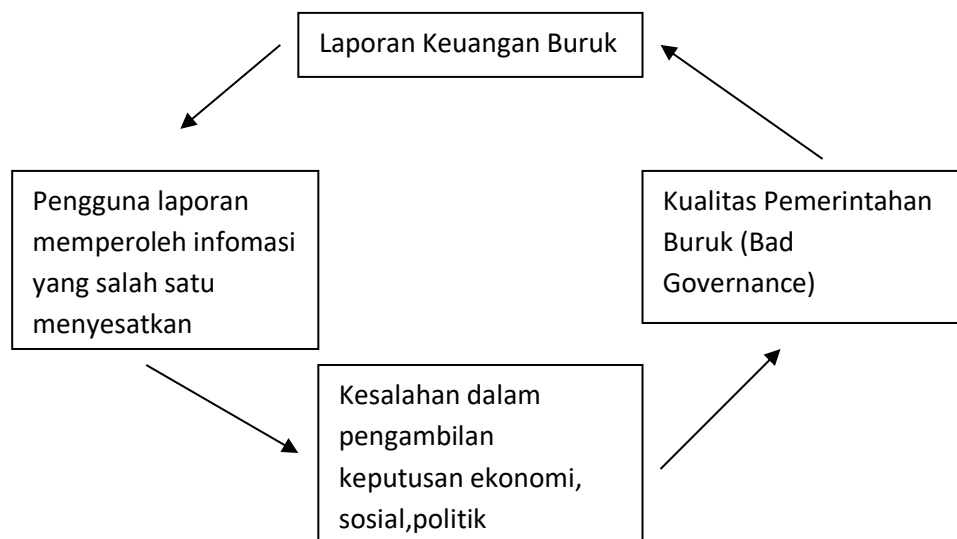
c. Dapat dibandingkan (*comparability*)

Artinya laporan keuangan dapat digunakan sebagai pembandingan kerja masa lalu atau pembandingan kinerja organisasi lain yang sejenis.

d. Dapat dipahami (*understandability*)

Artinya laporan keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan.

## 6. Dampak Pelaporan Keuangan Yang buruk



Gambar 2.1  
Lingkaran laporan keuangan yang buruk

Pada gambar di atas dijelaskan bahwa laporan keuangan yang buruk menyebabkan pengguna laporan keuangan memperoleh informasi yang salah dan menyesatkan. Apabila para pengguna tersebut sangat mengandalkan laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan, maka sangat mungkin terjadi kesalahan dalam pembuatan keputusan. Atau resiko minimalnya keputusan yang diambil kurang berkualitas, meskipun tidak salah. Pemerintah menjadi buruk (*bad governance*). Akibat lain dari informasi yang salah dan menyesatkan tersebut adalah pengguna laporan yang kritis dan rasional beberapa diantaranya akan bereaksi misalnya dengan mengkritik atau bahkan menuntut. Pemerintah selaku penyaji laporan keuangan karena telah memberika informasi yang salah dan menyesatkan sehingga pengguna laporan tersebut dirugikan secara material akan terlalu

percaya pada laporan itu. Jika pemerintah daerah mengabaikan reaksi pengguna laporan tersebut atau cenderung membela diri, maka pemerintah akan terus membuat laporan keuangan yang buruk kualitasnya, Mahmudi, 2016: 10).

## **7. Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Serikat dagang sektor publik GASB (1999, p. B148) dalam (Mardiasmo, 2018: 214) mengidentifikasi pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- a. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab.
- b. Legislatif dan badan pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat, dan
- c. Investor dan kreditur yang memberi pinjaman dan atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman.

Sedangkan menurut Mahmudi, 2016: 8 pengguna kebutuhan informasi laporan keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Masyarakat pengguna layanan public membutuhkan informasi atas kewajaran biaya, harga yang diterapkan, dan kualitas pelayanan yang diberikan. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui keberadaan dan pengguna dana yang telah mereka berikan.
- b. Masyarakat ingin mengetahui apakah pemerintah telah melakukan ketaatan anggaran dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan, apakah pajak daerah

yang mereka bayarkan telah dibelanjakan untuk kepentingan public apakah hak-hak public untuk mendapatkan pelayanan sudah dipenuhi dengan baik.

- c. Kreditor dan investor membutuhkan informasi keuangan daerah untuk menghitung tingkat rasio berinvestasi, kondisi kesehatan finansial daerah yang tingkat likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas daerah.
- d. DPRD dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atau kondisi keuangan pemerintah daerah dan penyelenggaraan keuangan negara.
- e. Manajer publik membutuhkan keuangan sebagai komponen system pengendalian manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian organisasi, pengukuran kinerja, dan membandingkan kinerja organisasi antar kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sejenis.
- f. Pegawai membutuhkan informasi atas kewajaran gaji dan kompensasi yang diterima dikaitkan dengan kinerja

## **8. Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah**

Siklus pengelolaan keuangan daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengelola keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi dan efektivitas, transparan, dan

akuntabel. Menurut (Mahmudi, 2016: 16) siklus pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya terdiri tiga tahap, yaitu:

a. Tahap Perencanaan

Dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, tahap perencanaan merupakan tahap yang sangat krusial. Peran DPRD dan masyarakat dalam tahap perencanaan sangat besar. Kualitas hasil (*outcome*) dari pengelolaan keuangan daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa bagus perencanaan yang dibuat. Pada tahap perencanaan ini dapat dipilih menjadi tiga bagian, yaitu apa yang menjadi *input*, *proses*, dan *outputnya*. *Input* dalam tahap perencanaan ini berupa dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Perencanaan itu sendiri pada dasarnya juga terdapat proses yang harus dilakukan sehingga menghasilkan *output* perencanaan berupa dokumen perencanaan daerah. Dokumen perencanaan pemerintah daerah tersebut meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- 3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- 4) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
- 5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja)
- 6) Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 7) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

b. Tahap Pelaksanaan



*Output* dari tahap pelaksanaan adalah berupa RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD. *Output* perencanaan tersebut akan menjadi *input* bagi tahap pelaksanaan, yaitu implementasi anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah ini sangat penting, karena bagaimanapun bagusya perencanaan anggaran apabila dalam tahap implementasi tidak terdapat sistem akuntansi yang memadai, maka banyak hal yang direncanakan tidak akan mencapai hasil yang diinginkan. Sistem akuntansi yang buruk akan memicu terjadinya kebocoran anggaran, inefisiensi, dan ketidakakuratan laporan keuangan melalui sistem akuntansi pemerintah daerah itulah akan dihasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang merupakan output dari tahap pelaksanaan.

#### c. Tahap Pelaporan

*Output* dari tahap pelaksanaan yang berupa laporan pelaksanaan anggaran akan menjadi *input* bagi tahap pelaporan. *Input* tersebut akan diposes lebih lanjut untuk menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akan dipublikasikan. Proses pelaporan tersebut dilakukan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang sudah ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah, maka laporan keuangan daerah siap untuk diaudit oleh auditor independen, selanjutnya setelah diaudit dapat didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat luas. Laporan keuangan publikasian yang sudah diaudit tersebut selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi

kinerja dan memberikan umpan balik bagi perencanaan periode berikutnya.

d. Tahap Evaluasi Kerja

Laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah untuk disampaikan kepada DPRD dan masyarakat yang selanjutnya akan digunakan sebagai informasi untuk evaluasi kinerja eksekutif. LKPJ kepala daerah terdiri atas laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja program atau kegiatan.

## **9. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah**

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan kumpulan dari subsistem-subsistem yang di dalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan keuangan untuk pihak luar maupun internal dalam pemerintah daerah. Menurut (Mahmudi, 2016: 16) komponen sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai berikut, yaitu:

a. Tujuan sistem akuntansi

Pengimplementasikan sistem akuntansi pemerintah daerah bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas

- 2) Mendukung perasi rutin harian
- 3) Meningkatkan kualitas laporan keuangan
- 4) Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
- 5) Meningkatkan akuntabilitas finansial
- 6) Melindungi aset pemerintah daerah

b. Sistem pengendalian Interal (SIP)

Sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang di dalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integraldari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern adalah:

- 1) Untuk melindungi aset (termasuk data) negara
- 2) Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
- 3) Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4) Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)

5) Untuk efisiensi dan efektivitas operasi

6) Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Sistem Prosedur Akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah meliputi:

- 1) Sistem dan prosedur penerimaan kas
- 2) Sistem dan prosedur pengeluaran kas
- 3) Sistem dan prosedur akuntansi selain kas
- 4) Sistem dan prosedur akuntansi aset

d. Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat beresiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dan memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah dan ilegal.

Sistem otorisasi dalam pengelolaan keuangan daerah ditetapkan oleh kepala daerah. Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penatausahaan pelaksanaan APBD, paling lambat satu bulan setelah penetapan APBD, menetapkan keputusan tentang:

- 1) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD)
- 2) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 3) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)
- 4) Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 5) Pejabat yang berwenang mengelola penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta segala bentuk kekayaan daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah.

Selain penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah, juga diatur mekanisme pencairan dana untuk melaksanakan setiap kegiatan yang telah disetujui dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Kepala Satuan Kerja selaku pengguna anggaran bertanggungjawab atas penggunaan anggaran dan penatausahaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, di setiap SKPD ditunjuk bendahara pemerintah dan

bendahara pengeluaran dalam rangka membantu memperlancar tugas kepala SKPD dalam menatausahakan APBD struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah di tingkat SKPD kuang lebih sebagai berikut:

- 1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang Daerah
- 2) Bendahara yang terdiri atas:
  - a) Bendahara Penerimaan
  - b) Bendahara Pengeluaran
- 3) Pemegang Barang
- 4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang terdiri atas:
  - a) Panitia Pengadaan Barang/Jasa
  - b) Panitia Penerimaan dan Pemeriksa Barang
  - c) Staf Teknis
  - d) Staf Administrasi
  - e) Staf Pendukung lainnya
- e. Formulir, Dokumen,dna Catatan Akuntansi

Setiap transaksi yang terjadi di pemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan. Formuir dan dokumen

transaksi yang digunakan di pemerintah daerah untuk mencatat transaksi antara lain:

- 1) Peraturan daerah APBD
- 2) Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SDA-SKPD)
- 3) Surat Penyediaan Dana (SPD)
- 4) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- 5) Surat Perintah Membayar (SPM)
- 6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 7) Surat Tanda Setoran (STS)
- 8) Kuitansi

f. Pemisahan Tugas

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus diisahkan. Suatu transaksksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pemegang uang dengan pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (*tupoksi*) yang jelas dalam rangka mneghindari terjadinya kolusi, kecurangan, korupsi.

g. Kode Akun (*Chart of Account*)

Kode akun (rekening) merupakan dsalah satu komponen penting dalam sistem akuntansipemerintah daerah. Kode akun digunakan untuk memperlakukan suatu transaksi harus dicatat ke rekening mana. Kode

akan disusun berdasarkan subklasifikasi dan kelompok sesuai dengan ketentuan penyajian laporan keuangan. Rekening pemerintah daerah dikelompokkan menjadi rekening neraca (rekening rill) dan rekening anggaran (rekening nominal). Rekening neraca disubklasifikasikan lagi menjadi kelompok aset lancar, investasi, aset tetap, aset lainnya, kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana. Rekening anggaran dikelompokkan menjadi rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Untuk memudahkan identifikasi, tiap rekening diberi kode atau nomor rekening. Jumlah digit untuk tiap kode rekening bisa bervariasi untuk masing-masing pemerintah daerah. Ketentuan tentang pembuatan kode rekening telah diatur secara khusus dalam Permendagri NO. 59 Tahun 2007.

## **10. Pemahaman Akuntansi**

Pemahaman akuntansi adalah suatu kemampuan seseorang dalam memahami tentang bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Mardiana & Fahlevi, 2017)



Menuruh (Mahmudi, 2016: 70) neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan keuangan terdiri dari tiga bagian, yaitu :

a. Aset

Aset dalam neraca menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial dimasa yang akan datang. Aset dikasifikasikan menjadi empat jenis, yaitu:

1) Aset Lancar

Aset lancar merupakan kas dan setara kas yang siap digunakan dan tidak terkait penggunaannya serta aset lainnya yang dapat segera diubah menjadi kas dan setara kas dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, sedangkan investasi permanen merupakan investasai jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

3) Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki pemerintah daerah yang secara aktif digunakan untuk kegiatan operasi pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

#### 4) Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan atau dibatasi penggunaannya, dikhususkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

##### a. Kewajiban

Kewajiban memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- 1) Kewajiban jangka pendek
- 2) Kewajiban jangka panjang

##### b. Ekuitas

Ekuitas berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: 1) kuitas dana lancar, 2) ekuitas dana investasi, 3) ekuitas dana cadangan. Namun, Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, akun Ekuuitas tidak dirincilagi dalam tiga jenis ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi dan ekuitas dana cadangan.

Adapun proses/siklus akuntansi keuangan sektor publik menurut Bastian (2010: 318) dalam (Diani, 2014) adalah sebagai berikut:

##### a. Transaksi

Transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. Transaksi-transaksi inilah yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi.

b. Analisis bukti transaksi

Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan.

c. Mencatat Data Transaksi

Seperti yang telah dijelaskan di atas, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal

d. Mengelompokkan dan Mengikhtisarkan Data yang Dicatat (*Posting*)

Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan atas transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan *posting*.

e. Penerbitan Laporan dan Catatannya

Selama satu periode akuntansi, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian, berdasarkan catatan tersebut, dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang

telah disusun tersebut kemudian dianalisis untuk menilai kebenaran dan reliabilitasnya

Menurut (Warsono 2009: 2) dalam Lohanda (2017) komponen yang penting dalam mempelajari akuntansi ada tiga, yaitu:

- a. Input (masukan) berupa transaksi, yaitu peristiwa yang bersifat keuangan.
- b. Proses sistematis, terdiri dari fungsi pengidentifikasian transaksi sampai dengan penyusunan informasi keuangan. Proses utama akuntansi yang spesifik adalah pencatatan yang terdiri dari dua fungsi, yaitu penjurnalan dan pemindahbukuan.
- c. Output (keluaran) berupa informasi keuangan. Salah satu output akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca dan arus kas.

Berdasarkan pemahaman diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi seorang yang dapat dinilai ndari tingkatan pengetahuan seseorang dalam memahami siklus akuntansi, meliputi pemahaman atas:

- a. Jurnal

Transaksi dicatat pertama kali yang disebut jurnal atau buku harian. Jurnal atau buku harian adalah suatu catatan peristiwa dari transaksi entitas.

- b. Buku Besar

Buku besar merupakan buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi. Fungsi dari buku besar ini adalah sebagai dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi.

c. Peringkasan ke dalam neraca saldo

Neraca saldo merupakan kesimpulan dari saldo-saldo yang ada pada setiap perkiraan di buku besar. Jumlah dari kolom debit dan kolom kredit harus sama, karena jika tidak sama, maka telah menjadi kesalahan pencatatan dari jurnal umum atau dari buku besar.

d. Pembuatan ayat-ayat jurnal penyesuaian

Penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan (akun) agar menunjukkan keadaan sebenarnya sebelum penyusunan laporan keuangan.

e. Pembuatan laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja bagi perusahaan tersebut.

## **11. Kualitas Aparatur Pemerintah**

Sumber Daya Manusia dalam organisasi atau lembaga pemerintahan mempunyai arti yang penting dengan pekerjaan itu sendiri, pentingnya peran Sumber Daya Manusia dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, Sumber Daya Manusia sebagai faktor penentu organisasi atau lembaga pemerintahan maka kompetensi menjadi aspek yang sangat

penting untuk menentukan keberhasilan organisasi atau lembaga pemerintahan. Dengan Kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi atau lembaga pemerintahan tentu hal ini akan menentukan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif lembaga pemerintahan itu sendiri (Armel, Nasir, & Safitri, 2017).

Dalam suatu organisasi terutama organisasi pemerintahan terkait upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tidak bisa terlepas dari adanya unsur sumber daya manusia sebagai penggerak jalannya organisasi. Sumber daya manusia menjadi penentu berjalan tidaknya suatu, selain ketersediaan sarana maupun prasarannya. Organisasi membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Agar terdapat manusia-manusia yang berkualitas atau manusia yang berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya manajemen sumber daya manusia (MSDM). Pemerintah daerah sangat membutuhkan PNSD yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi di bidangnya dan memiliki jiwa berkompetisi yang sportif. PNSD yang professional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. PNSD yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas PNSD di bidang akuntansi (keuangan)

merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah (Oktarina, Raharjo, & Andini, 2016)

Dengan adanya otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Penerapannya adalah pemerintah daerah harus memberikan penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pegawai negeri sipil daerah (PNSD). Pemerintah daerah sangat membutuhkan PNSD yang profesional dengan wawasan yang luas, memiliki kompetensi di bidangnya dan memiliki jiwa berkompetisi yang sportif. PNSD yang profesional akan mampu menyelesaikan tugas dan pekerjaannya secara tuntas dan benar. Dengan kompetensi yang dimilikinya, PNSD dapat melaksanakan tugas pokok, tanggungjawab dan fungsinya secara optimal. PNSD yang berkualitas dan kompeten dalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penyangga utama untuk dapat tersusunnya laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini berarti kualitas PNSD dibidang akuntansi (keuangan) merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang disusun pemerintah daerah (adhi, daniel kartika & suhardjo, 2013)

Hutapea dan Thoha (2008: 8) dalam Ahsani (2016) mengungkapkan bahwa ada tiga aspek utama pembentukan kompetensi sumber daya manusia, yaitu:

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Adalah informasi yang dimiliki seseorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai bidang yang ditekuni.

Ilmu atau informasi yang dimiliki seseorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.

b. Keterampilan (*Skill*)

Adalah upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini sangat berpengaruh dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi.

c. Sikap (*Attitude*)

Adalah pola tingkah seseorang pegawai didalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perusahaan. Apabila seorang pegawai memiliki sifat yang mendukung dalam pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Menurut Griffin (2004) dalam Andrianto (2017), kompetensi sumber daya dapat manusia diukur melalui:

a. Pendidikan



Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang umum dilakukan dalam kehidupan manusia. Pendidikan adalah proses sistematis dalam mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan dapat dibagi menjadi: pendidikan formal, pendidikan informal, pendidikan nonformal.

b. Pelatihan

Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

c. Pengalaman

Pengalaman dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luasa serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.

## **12. Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Menurut (Rusdiana & Irfan 2014: 52) pengertian dari teknologi informasi adalah suatu teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk kegiatan memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah. (Artika, ' & ', 2016)

Teknologi informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat merupakan keunggulan strategis karena teknologi informasi dapat diberikan kepada pengguna teknologi. Dengan demikian teknologi informasi strategi perusahaan untuk memenangkan persaingan. (Husain & Wibowo 2006: 28)

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses mendapatkan menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Dalam penjelasan peraturan pemerintah No.56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik.

Menurut (Kadir 2014: 12) mengemukakan bahwa, peranan teknologi informasi secara garis besar sebagai berikut:

- a. Teknologi Informasi menggantikan peran manusia, yakni teknologi informasi telah melakukan otomasi terhadap suatu tugas atau proses.
- b. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap sebuah tugas maupun proses.
- c. Teknologi informasi berperan dalam restukturasi terhadap peran manusia. Teknologi berperan dalam melakukan perubahan – perubahan terhadap sekumpulan tugas maupun proses.

Menurut (Suyanto 2005: 11) dalam Andrianto (2017), teknologi informasi dapat diukur melalui penggunaan komponen berikut:

- a. Perangkat Keras Komputer (*Hardware*)

Perangkat keras bagi suatu system informasi akuntansi terdiri atas masukan dan keluaran. Sebagai unit menyimpan *file* dan sebagainya, peralatan, penyiapan data dan terminal masukan dan keluaran.

- b. Perangkat Lunak Komputer (*Software*)

Seperti sistem perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti sistem pengoperasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan sistem yang berbasis komputer untuk memenuhi kebutuhan pengguna, contohnya: *e-commerce*, *DSS (Decision Support System)*, *e-bankig*, *SAP*, dan sebagainya.

- c. Jaringan dan komputer

Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam cara digunakan untuk mempermudah dan menjaga kualitas hubungan melalui internet. Sejak saat itulah perkembangan alat-alat yang menyongkong kemampuan jaringan untuk saling berhubungan berjalan dengan pesat.

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai kualitas laporan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

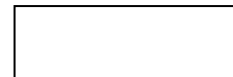
No	Nama Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dian Irma Diani (2014)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman)	pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peran internal audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2.	Dewa Gede Candra Wirawan (2016)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur	Hasil penelitian berdasarkan hasil pengujian secara statistik memberikan bukti bahwa penerapan Standar Akuntansi

Dilanjutkan ...

Lanjutan

		pemerintah daerah dan <i>good governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan di kota semarang (studi kasus pada dinas pengelolaan keuangan aset daerah kota semarang tahun 2014)	Pemerintahan (SAP), kualitas aparatur Pemerintah Daerah, dan <i>good governance</i> berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di kota Semarang.
3.	Safrida Yuliani, dkk (2010)	Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada pemerintah kota banda aceh)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesemua variabel independen yang diturunkan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.
4.	Mia, dkk (2016)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)	kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.
5.	Yuwita dan Suhesti (2019)	Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi	bahwa kualitas aparatur daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan

Dilanjutkan...



		Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo)	keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo.
6.	Daniel Kartika Adhi dan Yohanes Suhardjo (2013)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah berpengaruh signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
7.	Nilam sari (2016)	Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, penerapan sap, pemanfaatan teknologi Informasi, dan sistem pengendalian intern Terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten bungo)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, penerapan SAP, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berpengaruh posi
8.	Raja Yoga Gustika Armel (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, penggunaan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan.

Dilanjutkan ....

		Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)	
9.	Yulia artika (2016)	Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, kapasitas sumber daya Manusia dan pemanfaatan teknologi Informasi terhadap kualitas laporan Keuangan pemerintah Kabupaten rokan hulu (studi pada skpd)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah, kapasitas sumber daya, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan
10.	M. Ali Fikri Biana dan Sri Pancawati (2016)	Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan penewarapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating.
11.	Kadek, dkk (2014)	Pengaruh kompetensi sdm, penerapan sap, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan satandar akuntansi pemerintah, sistem keuangan akuntansi daerah berpengaruh positif dan signifikan penerapan terhadap kualitas laporan keuangan dae ... Dilanjutkan ...
12.	Ida Ayu Kiranayanti	Pengaruh sumber daya manusia, sistem	Hasil pen... an bahwa kompetensi sumber daya

Lanjutan

	(2016)	pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah	manusia, sistem pengendalian intern, dan pemahaman atas regulasi sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
--	--------	---	---

Sumber: berbagai literature penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, penelitian ini mengkombinasikan variabel-variabel bebas/independen dari penelitian sebelumnya dan merujuk pada penelitian (Sari, 2016). Dengan persamaan pada variabel independen Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi Informasi, dan sistem pengendalian intern dan alat analisis menggunakan regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya adalah variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan pengendalian intern, objek penelitian di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, dan waktu penelitian yakni tahun 2020.

### C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah di identifikasikan atau dijelaskan secara logis antar variabel yang dianggap relevan dengan situasi masalah (Sekaran, 2017: 86). Berdasarkan pendapat tersebut maka kerangka pemikiran penelitian ini terdapat hipoesis sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



Menurut Poerwadarminta (2006) dalam (Sri, 2015) Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan, dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan Padateori diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi tersebut mengandung arti adanya hubungan paham terhadap akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Yuliani (2010) menjelaskan bahawa pemahaman akuntansi menghasilkan nilai pelaporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan yang semakin baik pula. Perubahan sistem pencatatan dalam pengelolaan keuangan daerah harus didukung oleh sumberdaya manusia yang memiliki keahlian yang cukup dalam sistem akuntansi pemerintahan. Rendahnya pemahaman pegawai penatausahaan terhadap tugas dan fungsinya menyebabkan keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan yang mempunyai nilai bagi penggunaanya akan dapat terwujud bila pelaksana akuntansi memiliki pengetahuan yang cukup terhadap sistem pencatatan dan pengelolaan keuangan. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah selaku pelaksana akuntansi suatu instansi berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan dengan didasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintah sehingga dapat digunakan oleh Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah untuk menyusun laporan keuangan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman akuntansi maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

## **2. Pengaruh Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah.**

Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang professional dibutuhkan pemerintah daerah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan kompetensi dan kualitas yang dimilikinya dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang kompeten dan mempunyai kualitas dibidang akuntansi (keuangan) mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah membutuhkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Daerah agar laporan keuangan yang disusun memenuhi kualifikasi informasi yang *useful* (Oktarina et al., 2016).

## **3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut (Rusdiana & Irfan 2014: 52) Pengertian dari teknologi informasi adalah suatu teknologi yang dapat digunakan untuk mengelola data, termasuk kegiatan mendapatkan, memproses, menyusun, menyimpan, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan akurat, dan tepat

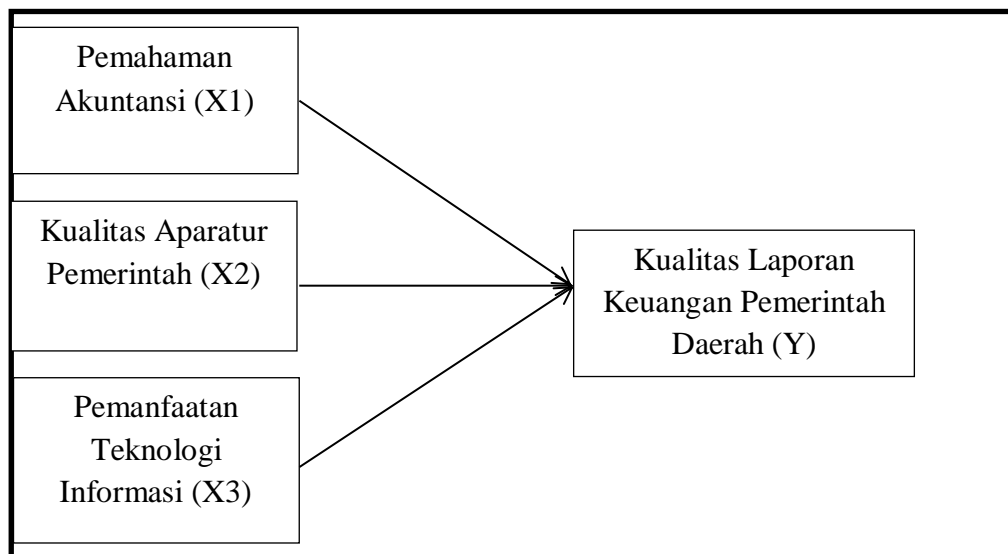
waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, ataupun pemerintah.

Teknologi Informasi (TI) merupakan sarana dalam penyebaran berbagai informasi yang menyangkut dalam berbagai hal di antaranya dalam rangka penyebaran informasi kepada pengguna informasi laporan keuangan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik (Wardani & Andriyani, 2017)

Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas pada saat sekarang ini, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola informasi secara cepat dan akurat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu (Armel et al., 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2016) dengan judul “pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, pemahaman Akuntansi, Penerapan SAP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dimana hasil penelitiannya membuktikan bahwa pemanfaatan

teknologi informasi memiliki kontribusi dan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas laporan Keuangan pemerintah Daerah. Hal ini dapat diartikan jika teknologi informasi dimanfaatkan secara maksimal maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat semakin akurat dan disajikan/dilaporkan tepat waktu. Kerangka dalam penelitian ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

#### **D. Perumusan Hipotesis**

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat ditarik kesimpulan hipotesis peneletian ini sebagai berikut:

H1 : Terdapat Pengaruh positif Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Derah Kabupaten Tegal.

H2 : Terdapat pengaruh positif Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daeah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

H3 : Terdapat pengaruh positif Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi, kualitas aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan analisis statistik SPSS versi 22.

#### B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai staf keuangan, bendahara organisasi perangkat daerah kabupaten tegal yang berjumlah 46 Organisasi Perangkat Daerah. Pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *sampel jenuh*. Sehingga sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 46 orang/responden. Berikut merupakan daftar sampel kuesioner sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Sampel**

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah
1.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM
2.	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertenakan
3.	Dinas Kerarsipan dan Perpustakaan
4.	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
5.	Dinas Penanaman Modan dan PTSP
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika

Lanjutan

7.	Dinas Perhubungan
8.	Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11.	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Dinas PPPA dan PPKB
13.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
14.	Dinas Sosial
15.	Satuan Polisi Pamong Praja
16.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruangdan Pertahanan
17.	Dinas Pekerjaan Umum
18.	Dinas Kesehatan
19.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20.	Bada Pengelola Pendapatan Daerah
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
22.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbag
23.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
24.	Badan PenaggulanganBencana Daerah
25.	Inspektorat Daerah
26.	Sekretariat Daerah
27.	Sekretariat DPRD
28.	Kantor Kebangpol dan Linmas
29.	Kecamatan Adiwerna

Dilanjutkan...

Lanjutan

30.	Kecamatan Bojong
31.	Kecamatan Bumijawa
32.	Kecamatan Dukuhturi
33.	Kecamatan Dukuhwaru
34.	Kecamatan Jatinegara
35.	Kecamatan Kedungbanteng
36.	Kecamatan Kramat
37.	Kecamatan Lebaksiu
38.	Kecamatan Margasari
39.	Kecamatan Pagerbarang
40.	Kecamatan Pangkah
41.	Kecamatan Slawi
42.	Kecamatan Suradadi
43.	Kecamatan Talang
44.	Kecamatan Tarub
45.	Kecamatan Warureja
46.	Kecamatan Balapulang

Sumber : data untuk penelitian

## C. Definisi Konseptual Dan Operasional Variabel

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Kualitas laporan keuangan adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari



pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Diani, 2014).

b. Pemahaman Akuntansi (X1)

Paham menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadarminta : 2006) dalam (Yuliani, 2010) mempunyai pengertian pandai dan mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi adalah seseorang yang paham, pandai, bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang di terapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

c. Kualitas Aparatur Pemerintah (X2)

Pengertian Aparatur Pemerintah Daerah menurut (Koswara, 2001 : 259) adalah “Seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan, termasuk PNS pusat yang diperbantukan kepada Pemerintah Daerah”. Berdasarkan pengertian diatas, kualitas aparatur pemerintah daerah merupakan semua pegawai yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah pada unit organisasi pemerintah daerah mulai dari pemerintahan tertinggi di kabupaten/kota hingga tingkat desa/kabupaten.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

Pemanfaatan teknologi Informasi adalah perilaku sikap akuntan dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan tanggungjawabnya serta meningkatkan kinerja (Sari, 2016)

## 2. Definisi Operasional Variabel

**Tabel 3.2**  
**Definisi Operasional Variabel Dependen (Y)**

<b>Variabael</b>	<b>Dimesi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) (Triwahyuni, 2016 dan Triwardana, 2017)	1. Relevan	a. Memiliki manfaat umpan balik b. Memiliki manfaat predikti c. Tepat waktu d. Lengkap	Interval
	2 Andal	a. Penyajian Jujur b. Dapat diverifikasi c. Netralis	Interval
	3. Dapat dibandingkan	a. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya b. Pngunaan kebijakan akuntansi	Interval
	4. Dapat dipahami	a. Dapat dipahami oleh pengguna b. Istilah mudah dipahami	Interval

**Tabel 3.3**  
**Definisi Operasional Variabel Independen (X)**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Pemahaman Akuntansi (X1) Nilam Sari (201)	1. Tingkat pemahaman siklus akuntansi	a. Jurnal b. Buku Besar c. Peringkasan ke neraca saldo	Interval

Dilanjutkan...

Lanjutan

		d. Pembuatan ayat –ayat jurnal penyesuaian e. Pembuatan laporan keuangan	
	2. Menyusun atau melaksanakan tahapan dalam proses akuntansi	a. Pencatatan (Recording) b. Pengelompokan (Classification) c. Pengikhtisaran (summarizing) d. Pelaporan (Reporting) e. Penafsiran (Analizing)	Interval
Kualitas Aparatur pemerintah (X2) (Siahaan, 2017 dan Rahayu, dkk 2014)	1. Latar Belakang Pendidikan	a. Latar belakang pendidikan akuntansi b. Lulusan minimal D3 Akuntansi	Interval
	2. Peran, Fungsi dan tanggungjawaban	a. Kemampuan pegawai b. Sesuai dengan keahlianpengelolaan keuangan	Interval
	3. pelatihan keahlian dalam tugas	a. Penguasaan dan pengembangan keahlian b. Mudah dipahami c. Materi sesuai kebutuhan	Interval
	4. Pengalaman	a. spesifikasi pekerjaan menjalankan tugas b. dapat mengurangi kesalahan c. tidak terlalu sulit untuk ditempatkan pada bagian lain yang sesuai	Interval
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) Reno Julia Utama (2017)	1. pengolahan informasi	a. sistem akuntansi sesuai dengan SAP	Interval
	2. Pemanfaatan teknologi informasi	a. jaringan internet dimanfaatkan dengan baik b. aplikasi yang digunakan	Interval
	3. Pengolahan data	a. laporan keuangan terkomputerisasi dengan baik b. software sesuai dengan undang-undang	Interval

Sumber : Data Olahan, 2020

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan kuesioner yang langsung diberikan kepada responden di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Kuesioner yang sudah diisi oleh responden diteliti terlebih dahulu agar kuesioner yang tidak lengkap pengisiannya tidak disertakan dalam analisis. Penelitian ini memilih cara demikian dengan pertimbangan bahwa metode survey langsung lebih efektif dan mengurangi resiko tidak kembalinya kuesioner yang telah disebar.

Dalam kuesioner penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah alat atau cara untuk mengukur pendapat, persepsi dan sikap seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, seperti yang dijelaskan oleh (Sugiyono, 2019: 146) sebagai berikut:

SS = Sangat Setuju : 5

ST = Setuju: 4

N = Netral : 3

TS = Tidak Setuju : 2

STS = Sangat Tidak Setuju : 1

## **E. Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis**

### **1. Stastistik Deskriptif**

Dalam Bukunya (Sugiyono, 2019: 206) menyatakan bahwa statistik dekriptif adalah data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dalam penelitian ini yaitu digunakan untuk memberikan informasi mengenai variabel peneliti seperti pemahaman akuntansi, kualitas aparatur pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi.

### **2. Uji Kualitas Data**

#### **a. Uji Validitas**

Menurut (Gozali, 2018: 51) pengujian validalitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan ssesuatu yang diukuroleh kuesioner tersebut. Mengukur valdalitas dapat dilakukan dengan tiga cara :

- 1) Melakukan koelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel
- 2) Melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk
- 3) Uji dengan *Confriratory Factor Analysis* (CFA)

#### **b. Uji Reabilitas**

Uji Reabilitas Adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengukuran realibilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- 1) *Repeated Measure* atau pengukuran ulang yaitu dimana seseorang akan diberikan pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah dia tetap konsisten dengan jawabannya.
- 2) *One shot* atau pengukuran sekali saja yaitu pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan (Gozali, 2018: 46)

### **3. Uji Asumsi Klasik**

#### **a. Uji Normalitas**

Ghozali (2018: 161) Menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Diketahui bahwa uji t menggambarkan nilai residual mengikuti distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar maka uji statistik akan menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu: uji statistik. Uji statistik dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).

Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

Data residual berdistribusi normal :  $H_0$

Data residual berdistribusi tidak normal :  $H_a$

### b. Uji Multikolonieritas

Ghozali (2018: 107) menyebutkan bahwa uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen) model regresi yang bagus sebaiknya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Apabila variabel independen ini saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menjelaskan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Di dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabelitas variabel independen yang terpilih tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Maka nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai cutoff yang umum dapat dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai  $Tolerance \leq 0.10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ .

Berdasarkan aturan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Jika nilai VIF lebih dari angka 10 atau nilai *tolerance* kurang dari 0.10 maka dikatakan terjadi gejala multikolonieritas.

- b. Jika nilai VIF kurang dari angka 10 atau nilai *tolerance* kurang dari 0.10 maka dikatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas (Ghozali, 2018: 108)

#### 4. Analisis Regresi Berganda

Analisis Regresi Berganda Bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a = konstan

X1 = Pemahaman Akuntansi

X2 = Kualitas Aparatur Pemerintah

X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi

e = Error atau Residual

b1,b2,b3 = Koefisien Regresi

#### 5. Uji Hipotesis

- a. Uji Statistik t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan uji statistik t dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:



1. Nilai signifikan  $<0,025$  maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Nilai signifikan  $>0,025$  maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan variabel independen (Pemahaman Akuntansi, Kualitas Aparatur Pemerintah, pemanfaatan Teknologi Informasi) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah).

#### **6. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Menurut Ghozali (2018: 97) koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinan untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (*time series*) juga biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kabupaten Tegal**

Kabupaten Tegal adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat laut provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang memiliki luas 876,10 km<sup>2</sup>. Pusat administrasinya dulu berada di Kota Tegal yang terletak disudut barat laut kabupaten, namun kemudian kota Tegal secara administratif terpisah dari kabupaten dan membentuk sebuah wilayah sendiri. Kemudian digantikan oleh kota slawi sebagai pusat administrasi sampai saat ini, merupakan pinggiran kota yang terletak sekitar 20 km dari selatan pusat kota dalam batas kabupaten. (Wikipedia.org).

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950. Nama Tegal berasal dari nama Tetegal, tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian, Kapupten Tegal berdiri pada tanggal 18 Mei 1961 pada saat Ki Gede Sebayu diangkat sebagai juru demung di Tegal oleh Sultan Mataram, dan mulai membangun daerah ini (wikipedia.org).

Secara geografis kabupaten tegal terlerak dibagian barat laut provinsi Jawa Tengah, dengan letak geografis 108° 57'6" - 109° 21'30" Bujur Timur

dan 6°02'41" – 7°15'30" Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten Tegal terbagi dalam 18 Kecamatan yang terdiri dari 281 Desa dan 6 Kelurahan. Adapun jumlah entitas akuntansi (Organisasi Perangkat Daerah) pada pemerintah Daerah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 Sekretariat, 19 Dinas, 5 Badan, 18 Kecamatan dan 2 Rumah Sakit Umum Daerah (Setda.tegalkab.go.id).

## **2. Visi dan Misi Kabupaten Tegal**

### **a. Visi**

Visi Kabupaten Tegal yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera.”

### **b. Misi**

Misi Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut:

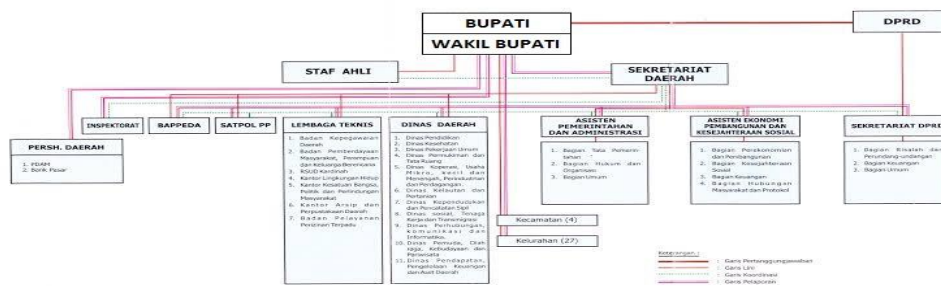
- 1) Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsive terhadap pemenuhan hak dasar rakyat.
- 2) Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian.
- 3) Mewujudkan kehidupan perseduluran dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
- 4) Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tadisional.

- 5) Meningkatkan kesehjahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

### 3. Struktur Organisasi Kabupaten Tegal

Struktur Organisasi Kabupaten Tegal yaitu sebagai berikut :

Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal



Sumber: Website Pemerintah Kabupaten Tegal

## B. Hasil Penelitian

### 1. Deskriptif Data

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bidang keuangan seperti Bendahara, Staf keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tegal. Sesuai dengan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal yang berjumlah 48 Organisasi Perangkat Daerah. Pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 8 Mei – 1 Juni 2020. Distribusi mengenai penyebaran kuesioner disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
1.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	1	1
2.	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertenakan	1	1
3.	Dinas Kearsipan dan Pepustakaan	1	1
4.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1	1
5.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1	1
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	1
7.	Dinas Perhubungan	1	1
8.	Dinas Pertanian dan Pertahanan Pangan	1	1
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	1
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1	1
11.	Dinas Lingkungan Hidup	1	1
12.	Dinas PPPA dan PPKB	1	1
13.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	1	1
14.	Dinas Sosial	1	1
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1
16.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertahanan	1	1
17.	Dinas Pekerjaan Umum	1	1
18.	Dinas Kesehatan	1	1

Dilanjutkan ...

Lanjutan

19.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1	1
20.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1	1
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1	1
22.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	1	1
23.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	1	1
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1
25.	Badan Kesbangpol dan Linmas	1	1
26.	Inspektorat	1	1
27.	Sekretariat DPRD	1	1
28.	Sekretariat Daerah	1	1
29.	Kecamatan Adiwerna	1	1
30.	Kecamatan Balapulang	1	1
31.	Kecamatan Bojong	1	1
32.	Kecamatan Bumijawa	1	1
33.	Kecamatan Dukuhturi	1	1
34.	Kecamatan Dukuhwaru	1	1
35.	Kecamatan Jatinegara	1	1
36.	Kecamatan Kedungbanteng	1	1
37.	Kecamatan Kramat	1	1
38.	Kecamatan Lebaksiu	1	1
39.	Kecamatan Margasari	1	1
40.	Kecamatan Pagerbarang	1	1
41.	Kecamatan Pangkah	1	1
42.	Kecamatan Slawi	1	1
43.	Kecamatan Suradadi	1	1
44.	Kecamatan Talang	1	1
45.	Kecamatan Tarub	1	1
46.	Kecamatan Warureja	1	1

Dilanjutkan ...

Lanjutan

47.	RSUD Dr. Soeselo	1	1
48.	RSUD Suradadi	1	1

Sumber: Olahan Data Tahun 2020

Dari 48 (100%) kuesioner yang disebar, 48 (100%) kuesioner diterima kembali. Dari kuesioner yang diterima kembali, data yang diperoleh nantinya akan diolah untuk menguji hipotesis. Berikut karakteristik responden yang telah menjawab pertanyaan disajikan dalam tabel dibawah ini:

a. Klasifikasi responden menurut jenis kelamin

Tabel 4.2  
Profil Responden Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Orang	Presentasi
1.	Laki-laki	26	54%
2.	Perempuan	22	46%
<b>Jumlah</b>		48	100%

Sumber: Data Olahan Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut diatas diketahui bahwa laki-laki mendominasi menjadi pegawai bagian keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal yaitu terdapat 26 orang pegawai atau 54 % dan pegawai perempuan 22 orang atau 46%.

## b. Klasifikasi responden menurut tingkat Pendidikan

Tabel 4.3  
Profil Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang	Prosentase
1.	Sarjana (S2)	8	16%
2.	Sarjana (S1)	35	72%
3.	Diploma	1	1%
4.	SMA	4	11%
<b>Jumlah</b>		48	100%

Sumber: Olahan Data Tahun 2020

Berdasarkan tabel 4.3 tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden hampir seluruhnya sudah melampaui persyaratan minimal untuk menduduki jabatan dibidang keuangan. Tingkat rendahnya kualitas Aparatur Pemerintah juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keahlian yang dimiliki. Dalam penelitian ini jumlah tingkat Pendidikan responden yaitu Strata 2 berjumlah 8 orang atau 16 % , Strata 1 berjumlah 35 orang atau 72 % , Diploma berjumlah 1 orang atau 1%, dan SMA berjumlah 4 orang atau 11 %.

## c. Klasifikasi responden menurut masa kerja

Tabel 4.4  
Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah Orang	Prosentase
1.	1-5 Tahun	6	12%
2.	6-10 Tahun	16	33%
3.	11-20 Tahun	17	35%
4.	> 20 Tahun	9	20%
<b>Jumlah</b>		48	100%

Sumber: Olahan Data Tahun 2020



Berdasarkan tabel 4.4 tersebut dapat diketahui bahwa masa kerja responden berbeda-beda diantaranya untuk 1-5 tahun menduduki jabatan sebanyak 6 orang atau 12%, 6-10 Tahun berjumlah 16 orang atau 33 %, 11-20 Tahun berjumlah 17 Orang atau 35%, >20 Tahun berjumlah 9 orang atau 20%. Dalam penelitian ini mayoritas responden bekerja selama 11-20 tahun sehingga itu sangat mempengaruhi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **2. Analisis dan Pengujian Data**

### **a. Hasil Uji Kualitas Data**

#### **1. Hasil Uji Validitas**

Menurut (Ghozali 2018: 51) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dari hasil validitas didapatkan tiga variabel, yaitu Pemahaman Akuntansi (X1), Kualitas Aparatur Pemerintah (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi product moment pada *level of significant* 5% (0,05) dengan derajat kebebasan 48, maka di dapat  $r_{\text{tabel}} = 0,284$ . Dengan ketentuan  $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$  maka item pertanyaan tersebut valid dan apabila  $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$  maka item pertanyaan tersebut tidak valid, juga apabila  $r_{\text{hitung}}$  dari item pertanyaan tersebut negative maka tidak valid. Adapun hasil

perhitungan SPSS Versi 22 untuk tiap item pertanyaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Hasil Uji Validitas

Variabel	No Soal	Validitas		Keterangan
Pemahaman Akunatnsi	X1.1	0,641	0,284	Valid
	X1.2	0,656	0,284	Valid
	X1.3	0,536	0,284	Valid
	X1.4	0,586	0,284	Valid
	X1.4	0,612	0,284	Valid
	X1.6	0,603	0,284	Valid
	X1.7	0,553	0,284	Valid
	X1.8	0,623	0,284	Valid
	X1.9	0,665	0,284	Valid
	X1.10	0,585	0,284	Valid
	X1.11	0,536	0,284	Valid
	X1.12	0,480	0,284	Valid
	X1.13	0,308	0,284	Valid
Kualitas Aparatur Pemerintah	X2.1	0,760	0,284	Valid
	X2.2	0,702	0,284	Valid
	X2.3	0,580	0,284	Valid
	X2.4	0,689	0,284	Valid
	X2.5	0,740	0,284	Valid
	X2.6	0,701	0,284	Valid
	X2.7	0,740	0,284	Valid
	X2.8	0,694	0,284	Valid
	X2.9	0,675	0,284	Valid
	X2.10	0,583	0,284	Valid
	X2.11	0,619	0,284	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X3.1	0,774	0,284	Valid
	X3.2	0,733	0,284	Valid
	X3.3	0,622	0,284	Valid
	X3.4	0,521	0,284	Valid
	X3.5	0,606	0,284	Valid
	X3.6	0,742	0,284	Valid

Dilanjutkan ..

Lanjutan

	X3.7	0,729	0,284	Valid
kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Y.1	0,425	0,284	Valid
	Y.2	0,631	0,284	Valid
	Y.3	0,760	0,284	Valid
	Y.4	0,355	0,284	Valid
	Y.5	0,640	0,284	Valid
	Y.6	0,537	0,284	Valid
	Y.7	0,424	0,284	Valid
	Y.8	0,425	0,284	Valid
	Y.9	0,629	0,284	Valid

Sumber: Olahan Data SPSS Versi 22

## 2. Hasil Uji Reliabilitas

Untuk menguji keandalan kuesioner maka digunakan uji reliabilitas. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dikatakan reliable atau handal jika jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama. Kriteria pengukuran uji reliabilitas dilakukan dengan cara *one shot* atau pengukuran sekali saja variabel dikatakan reliable jika memberikan *nilai cronbach alpha* > 0,6 dengan ketentuan  $r_{hitung} > nilai\ cronbach\ alpha$  maka item pernyataan tersebut reliabel dan apabila  $r_{hitung} < nilai\ cronbach\ alpha$  maka item pernyataan tersebut tidak reliabel (Ghozali, 2018: 45)

Tabel 4.6  
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	r Hitung	Nilai Cronbach Alpha	Status
Kualitas Laporan Keuangan Pemerinath Daerah	0,700	0,6	Reliabel
Pemahaman Akuntansi	0,815	0,6	Reliabel
Kualitas Aparatur Pemerintah	0,881	0,6	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,779	0,6	Reliabel

Sumber: Olahan Data SPSS Versi 22

Dari tabel 4.6 Diketahui bahwa koefisien reliabilitas variabel Pemahaman Akuntansi sebesar 0,815, koefisien Kualitas Aparatur Pemerintah sebesar 0,881, koefisien Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,779, dan koefisien Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,700. Hal ini menunjukkan bahwa semua koefisien reliabilitas . 0,6 maka dinyatakan reliabel.

#### b. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data secara umum (Ghozali, 2018: 19). Pada penelitian ini, statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standar deviasi*) dengan N merupakan sampel atau banyaknya responden dalam penelitian. Analisis deskriptif semua variabel yang digunakan dalam model disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7  
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Akuntansi	48	34	58	46.73	6.056
Kualitas Aparatur Pemerintah	48	25	48	41.08	6.195
Pemanfaatan Teknologi Informasi	48	17	35	27.71	4.089
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	48	21	41	32.60	4.296
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Olahan Data SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan statistic deskriptif dari variabel-variabel yang diteliti Variabel Pemahaman Akuntansi memiliki nilai minimum sebesar 34, nilai maksimum sebesar 58, rata-rata sebesar 46,73 dan standar deviasi sebesar 6,058. Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 25, nilai maksimum sebesar 48, rata-rata sebesar 41,08 dan standar deviasi sebesar 6,195. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum 35, rata-rata sebesar 27,71 dan standar deviasi sebesar 4,098. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Dearah memiliki nilai minimum sebesar 21, nilai maksium sebesar 41, rata-rata sebesar 32,60 dan satndar deviasi sebesar 4,296.

### c. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan mewakili (*representatif*), maka model tersebut harus memenuhi uji asumsi klasik regresi, yang meliputi:

#### 1. Uji Normalitas

Menurut (Ghozali, 2018: 161) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengansumsi bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik.

Uji statistik yang digunakan yaitu menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai sig (Signifikansi) > 0,05 maka data berdistribusi normal dan apabila nilai sig (signifikasi) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal Menurut (Ghozali, 2018: 166) uji K – S dilakukan dengan membuat hipotesis:

H<sub>0</sub> : Data residual berdistribusi normal

H<sub>A</sub> : Data residual berdistribusi tidak normal

Tabel 4.8  
Hasil Uji Normalitas (Uji Statistik)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		48
Normal	Mean	.0000000
Parameters <sup>a,b</sup>	Std. Deviation	2.53200667
Most Extreme	Absolute	.063
Differences	Positive	.042
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: *Output SPSS Versi 22*

Berdasarkan hasil Output pengolahan data uji normalitas dengan menggunakan rumus *Kolmogorov-Smirnov Test* sebagaimana tertera pada tabel 4.8, maka dapat diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-Trailed)* sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel Independen. Apabila terdapat variabel Independen yang saling berkolerasi, dapat dikatakan

variabel-variabel tersebut tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2018: 107).

Uji Multikolonieritas juga dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Kedua ukuran tersebut menunjukkan bahwa setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen yang lain. Dengan demikian, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF=1/tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance*  $\leq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \geq 10$  (Ghozali, 2018: 108). Hasil uji multikolonieritas penelitian ini disajikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.9  
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pemahaman Akuntansi	.480	2.084
Kualitas Aparatur Pemerintah	.651	1.537
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.660	1.516

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan  
Pemerintah Daerah

Sumber: *Output SPSS Versi 22*



Berdasarkan hasil *output* uji multikolonieritas pada model regresi seperti tertera pada tabel 4.9, diperoleh data bahwa nilai *tolerance* Pemahaman Akuntansi sebesar 0,480, Kualitas Aparatur Pemerintah sebesar 0,561, Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,660. Semua nilai *tolerance* tersebut masing-masing biaya  $> 0,10$ . Sementara nilai VIF Pemahaman Akuntansi sebesar 2,084, Kualitas Aparatur Pemerintah 1,537, Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 1,516. Semua nilai VIF tersebut masing-masing  $< 10,000$ . Sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolonieritas.

#### d. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada perhitungan SPSS versi 22 menghasilkan data yaitu

Tabel 4.10  
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.082	3.316		.929	.358
Pemahaman Akuntansi	.308	.091	.434	3.387	.001
Kualitas Aparatur Pemerintah	.102	.076	.147	1.334	.189
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.395	.115	.376	3.435	.001

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: Output SPSS Versi 22

Pada kolom *Unstandardized Coefficient* (B). tertera nilai constant sebesar 3.082, koefisien Pemahaman Akuntansi sebesar 0,380, Kualitas Aparatur Pemerintah 0,102, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,366. Dengan demikian dapat ditulis persamaan regresi menjadi bentuk persamaan sebagai berikut:

$$\text{Kualitas Laporan Keuangan} = \alpha + \beta_1 \text{PA} + \beta_2 \text{KAP} + \beta_3 \text{PTI} + e$$

$$\text{Kualitas Laporan Keuangan} = 3,082 + 0,380\text{PA} + 0,102\text{KAP} + 0,366\text{PTI} + e$$

Persamaan tersebut mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Nilai Konstanta sebesar 3.082 berarti bahwa tanpa adanya variabel Pemahaman Akuntansi, Kualitas Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan

Teknologi Informasi, maka Kualitas Laporan Keuangan adalah sebesar 3.082.

- b. Nilai koefisien dari Pemahaman Akuntansi sebesar 0,308 satuan bernilai positif, artinya apabila pemahaman akuntansi naik satu-satuan maka akan menaikkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,308.
- c. Nilai koefisien dari Kualitas Aparatur Pemerintah sebesar 0,102 satuan bernilai positif, artinya apabila kualitas aparatur pemerintah naik satu-satuan maka akan menaikkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,102.
- d. Nilai koefisien dari pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,395 satuan bernilai positif, artinya apabila pemanfaatan teknologi informasi naik satu-satuan maka akan menaikkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 0,395

#### **e. Hasil Uji Hipotesis**

##### **1. Uji Statistik t (Uji Parsial)**

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh dari satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen (Ghozali, 2018: 98). Pada penelitian ini pengujian dengan menggunakan signifikansi level 0,025. Adapun kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi  $< 0,025$  maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikansi  $> 0,025$  maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan variabel dependen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen.

Tabel 4.11  
Hasil Statistik t (Uji Parsial)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.082	3.316		.929	.358
Pemahaman Akuntansi	.308	.091	.434	3.387	.001
Kualitas Aparatur Pemerintah Pemanfaatan	.102	.076	.147	1.334	.189
Teknologi Informasi	.395	.115	.376	3.435	.001

a. Dependent Variable: Kaulitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber : Output SPSS Versi 22

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel diatas maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1) Variabel Pemahaman Akuntansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai  $0,001 < 0,025$ . Sementara t tabel dengan sig.  $\alpha = 0,025$  maka hipotesis

diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

- 2) Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,189. Nilai  $0,189 > 0,025$  sementara t tabel dengan sig.  $\alpha = 0,025$  maka hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Tidak berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001. Nilai  $0,001 < 0,025$  sementara t tabel dengan sig.  $\alpha = 0,025$  maka hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

f. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Menurut (Ghozali, 2018: 97) koefisien determinasi pada hakikatnya mengukur seberapa jauh kemampuan persamaan model dalam menerangkan variasi yang terdapat pada variabel dependen. Nilai  $R^2$  terletak diantara 0 sampai 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), nilai  $R^2$  yang kecil berarti menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel dependen sangat terbatas dan apabila nilai mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan. Untuk memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien determinasi dapat dihitung untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

jika mendapatkan nilai ( $R^2$ ) yang tinggi adalah baik, tetapi jika nilai ( $R^2$ ) rendah bukan berarti model regresi jelek.

Tabel 4.13  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.808 <sub>a</sub>	.653	.629	2.617

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Aparatur Pemerintah, Pemahaman Akuntansi  
Sumber: Output SPSS Versi 22.

Pada tabel 4.13 didapat nilai Adjusted R Square 0,629 atau 62,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dipengaruhi oleh variabel Pemahaman Akuntansi, Kualitas Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 62,9%. Sedangkan sisanya sebesar 37,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

### C. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka diperoleh suatu hasil penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji hipotesis pertama, diduga Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil signifikansi sebesar  $0,001 < 0,025$  semestara  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $3,387 > 2,01537$ ).

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Diani (2016). Hal ini mengungkapkan bahwa untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka kualitas orang-orang yang melaksanakan tugas dalam menyusun laporan keuangan harus menjadi perhatian utama yaitu para pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut harus mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

2. Untuk menguji hipotesis kedua, diduga Kualitas Aparatur Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil nilai signifikansi sebesar  $0,198 > 0,025$  sementara  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $1,338 > 2,01537$ ).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh (adhi, daniel kartika & suhardjo, 2013) menyatakan bahwa Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Artinya bahwa ada pengaruh antara variabel kualitas aparatur Pemerintah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah PNSD yang memahami dan memiliki kompetensi dibidang akuntansi (keuangan) dibutuhkan oleh Pemerintah menyusun Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas.

Dalam Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007 indikator kompetensi sumber daya manusia (pegawai) adalah: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik,

SKPD harus memiliki aparatur daerah yang berkualitas yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi dan mempunyai pengalaman dibidang keuangan yang diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. aparatur yang berkompeten akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik Yuwita Ariessa Pravasanti & Suhesti Ningsih 2019.

Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik (Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010). Jika teknologi dimanfaatkan secara maksimal maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin baik dan efisien.

3. Untuk menguji hipotesis ketiga, diduga Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan hasil nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,025$  sementara  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  ( $3,435 < 2,01537$ ).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh sari (2016) & Raja Yoga Gustika Armel (2017) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti penggunaan komputer dan memanfaatkan jaringan internet dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik pemanfaatan teknologi informasi,



maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan fenomena, rumusan masalah, hipotesis, hasil dan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa

1. Pemahaman Akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka di Organisasi Perangkat Daerah sudah memiliki pengetahuan akuntansi dan paham akan proses akuntansi. Pegawai juga berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga pegawai bagian keuangan tau cara menyusun laporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan standar yang berlaku sehingga dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas. Dengan dibuktikannya penelitian ini nilai signifikansi  $0,001 < 0,025$ .
2. Kualitas Aparatur Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka kualitas aparatur pemerintah di organisasi perangkat daerah kabupaten tegal masih dikatakan rendah, karena masih banyak pegawai yang belum ditempatkan sesuai dengan bidang atau kemampuannya dan diterbatasnya sumber daya manusia yang dimiliki. Dengan dibuktikannya pada penelitian ini nilai signifikansi  $0,189 > 0,025$ .

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka para pegawai di bagian keuangan organisasi perangkat daerah kabupaten tegal sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Dengan menggunakan komput dan jaringan dinternet dapat mempercepat laporan keuangan secara komputerisasi. Sehingga menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik. Dengan dibuktikannya pada penelitian ini nilai signifikansi  $0,001 < 0,025$ .

## **B. Saran**

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan tersebut diatas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi Perangkat Daerah agar mengikuti pelatihan serentak pada pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai bagaimana penyusunan laporan keuangan yang berlaku umum. Memberikan penghargaan kepada pegawai apabila pegawai tersebut memiliki kinerja yang memuaskan agar pegawai tersebut senantiasa memiliki komitmen dan loyal terhadap organisasi.
2. Terkait dengan Pemahaman Akuntansi dalam pemerintah daerah harus ditingkatkan lagi sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemahaman Akuntansi harus memberikan kontribusi yang cukup dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan . dengan adanya pemahaman akuntansi yang baik, maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kaupaten tegal akan semakin lebih baik lagi.

3. Pada penelitian ini Kualitas Aparatur Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Faktor penghambat antara lain banyak pegawai yang belum ditempatkan dibagian sesuai dengan keahlian dan keterbatasan sumber daya manusia, untuk itu organisasi perangkat daerah dimohon untuk menempatkan pegawainya sesuai dengan keahlian masing-masing. Semakin baik kualitas aparatur semai kn baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.
4. Pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyelurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik (Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010). Jika teknologi dimanfaatkan dengan baik dan secara maksimal maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan penelitian yang dengan keterbatasan tersebut dapat berpengaruh hasil penelitian keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adaalah sebagai berikut:

1. Jumlah responden yang hanya 48 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan data diperoleh berdasarkan persepsi responden berupa jawaban yang

terdapat kemungkinan bahwa hasil jawaban akan berbeda dengan keadaan sebenarnya.

3. Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan variabel dimana variabel yang diteliti hanya pemahaman akuntansi, kualitas aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengendalian intern dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, daniel kartika & suhardjo, yohanes. (2013). pengaruh penerapan SAP dan kualitas aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintah kota tual). *Jurnal STIE Semarang*, 5, no.
- Ahsani, Irvan. 2016. “Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah)” *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Andrianto, Elvin. 2017. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)”. *Universitas Negeri Yogyakarta*. Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Andrianto, E & Rahmawati, D. 2017. “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman)”. *Jurnal Fakultas Ekonomi*.
- Armel, R., Nasir, A., & Safitri, D. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 105–119.
- Artika, Y., ' Z., & ' H. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- Kabupaten Rokan Hulu (Studi Pada SKPD). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 219–233.
- Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 1–23.
- E, Koswara. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Pariba
- Faud, M, R. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Gahlia Indonesia.
- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hakim, Abdul (2017). "Pengaruh KOMPETENSI UMBER Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragini Hulu)". *JOM Fekom Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017*.
- Husain, M. F & wibowo, A. 2006. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Indriasih, D. "The Effect Of Government Apparatus Competence And The Effectiveness Of Government Internal Control Toard The Quality Of Financial Reporting And Its Impact On The Performance Accountability In Local Government (Survey Of All Units Local Government In Tegal City Central Java Province- Indonesian)". *South East Asia Journal of Cntemporary Business Economics and Law*, Vol.5. Issue 1 (Dec) 90-100
- Juli, V. N., Akuntansi, P. P., Sistem, P., Akuntansi, I., Daerah, K., & Peran, D. A. N. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 206–220.

- Kadir, A. 2014. *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Kartika, A. (2010). Pengaruh Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan Dalam Hubungan Antara partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran (Studi Empirik Pada Rumah Sakit Swasta di Kota Semarang). *Kajian Akuntansi*, 2(1)
- Lohanda, D." Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM berdasarkan SAK ETAP (Studi kasus pada UMKM kerajinan batik di Kecamatan Kraton Yogyakarta)". *Universitas Negeri Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kawatu, F, S. 2019 *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Jilid 1. Deepublish: Yogyakarta
- Kholis, M. 2013. "Pengaruh Kompetensi Pegawai dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Medan". *Universitas Negeri Medan*. Skripsi. Universitas Negeri Medan.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed.). Yogyakarta: STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiana, R., & Fahlevi, H. (2017). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pengendalian Internal dan Efektivitas Penerapan Sap Berbasis AkruaI terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satuan Perangkat Kerja Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(2), 30-38.
- Munawir. (2014). *Analisa Laporan Keuangan* (4th ed.). Yogyakarta: Liberty.
- Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang. *Journal*



*of Accounting Of Accounting*, 2(2), 2. <https://doi.org/10.1002/ca.21028>;  
10.1002/ca.21028

Rusdiana, A & Irfan, Moch. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.

Santoso, B. (2015). *Keagenan (Agency): Prinsip-Prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Sari, nilam. (2016). pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi, penerapan SAP, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kabupaten bu. *JOM Fekom*, 3(1).

Sekaran, U. (2017). *Metode Penelitian Untuk Bisnis – Buku 1 Edisi 6* . Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Sri, N. W. (2015). *Pengaruh pemahaman akuntansi, komitmen karyawan, dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah*. 1–27.

Wardani, Dewi Kusuma & Ika Andriyani. 2017. “Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten”. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017, halaman 88-98

Yuliani, Syafrida. 2010. *Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh)*. *Jurnal telaah dan riset akuntansi* Vol 3 No 2

Zubaidi, N., Cahyono, D., & Maharani, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *International Journal of Social Science and Business*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i2.17579>

**LAMPIRAN**

## Lampiran 1

### KUESIONER PENELITIAN

Yth. Bapak/Ibu Responden  
Penelitian  
Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penyusunan proposal skripsi sebagai tugas akhir pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal, maka saya:

Nama : Muniifah Anaan

NPM : 4316500124

Mengajukan permohonan kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuisoner ini. Adapun judul penelitian saya adalah “Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kualitas Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal)”. Informasi Bapak/Ibu sangat berguna bagi penelitian ini, karena Bapak/Ibu adalah orang yang tepat untuk mengutarakan pengalaman dan pendapat mengenai hal ini. Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan jujur dan benar.

Perlu saya sampaikan dalam pengisian kuesioner ini:

1. Tidak ada jawaban yang benar atau salah
2. Penilaian yang obyektif sangat diharapkan, karena akan menjadi umpan balik bagi pengembangan penelitian tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Setiap jawaban sangat bermakna bagi kami, sehingga kami mengharapkan tidak ada jawaban yang dikosongkan
4. Jawaban akan diperlakukan dengan standar profesionalitas dan etika penelitian. Sesuai dengan kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya. Atas waktu dan kerja sama Bapak/Ibu untuk mengisi kuisoner ini, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Muniifah Anaan  
NPM: 4316500124

### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Umur : Tahun
3. Jenis Kelamin :  Laki-laki  Perempuan
4. Pendidikan :  SMA  
 D3  
 S1  
 S2
5. Latar Belakang Pendidikan :  Akuntansi  Manajemen  
 MIPA  Matematika  
 Lain – lain ( )
6. NIP :
7. Jabatan :
8. Lama Bekerja :  1-5 thn  6-10 thn  10-15 thn >  thn
9. Nama OPD :

#### **Petunjuk Pengisian :**

1. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk masing – masing pertanyaan yang tersedia pada lembaran daftar kuisioner.
2. Bapak/Ibu/Saudara (i) cukup memberikan tanda centang pada kolom kode jawaban yang tersedia yaitu: SS, S, N, TS, dan STS.

Adapun skor untuk masing – masing jawaban adalah sebagai berikut:

**Skor 1 Sangat Tidak Setuju (STS)**

**Skor 2 Tidak Setuju (TS)**

**Skor 3 Netral (N)**

**Skor 4 Setuju (S)**

**Skor 5 Sangat Setuju (SS)**

## DAFTAR PERTANYAAN

### 1. Kualitas Laporan Keuangan

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
<b>Relevan</b>						
1.	Laporan keuangan pada instansi / lembaga tempat saya bekerja dapat memberikan informasi yang dapat mengoreksi ekpetasi mereka dimasa lalu.					
2.	Instansi / lembaga tempat saya bekerja dapat menyelesaikan laporan keuangan secara tepat waktu sesuai periode akuntansi.					
3.	Pada tempat saya bekerja, dapat mencakup laporan keuangan secara lengkap sehingga berguna untuk pengambilan keputusan.					
<b>Reliable / Andal</b>						
4.	Laporan keuangan pada instansi/lembaga tempat saya bekerja, menyajikan informasi secara jujur sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.					
5.	Informasi yang disajikan di instansi/ lembaga tempat saya bekerja bebas dari pengertian yang menyesatkan					
6.	Laporan keuangan di instansi/lembaga tempat saya bekerja menghasilkan informasi yang dapat di uji.					
<b>Dapat Dibandingkan</b>						
7.	Informasi yang termuat pada laporan keuangan di instansi/lembaga tempat kerja					

	saya selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan tahun lalu.					
8.	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.					
<b>Dapat dipahami</b>						
9.	Laporan keuangan di instansi/lembaga tempat saya bekerja menghasilkan informasi yang mudah di pahami dan mudah di mengerti oleh pengguna					

## 2. Pemahaman Akuntansi

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
<b>Tingkat pemahaman Siklus Akuntansi</b>						
1.	Saya memahami pengertian dan fungsi dari penjurnalan.					
2.	saya memahami akun-akun yang berubah dari penjurnalan.					
3.	saya memahami pengertian dan fungsi dari buku besar.					
4.	saya memahami akun apa saja yang ada didalam buku besar.					
5.	saya memahami pengertian dan fungsi dari neraca saldo.					
6.	saya memahami unsur-unsur neraca saldo yang terdiri dari aset, utang dan modal.					
7.	saya memahami akun apa saja yang ada didalam jurnal penyesuaian.					
8.	saya memahami pencatatan akuntansi berbasis akrual.					
9.	saya memahami sistem dan prosedur penyusunan pencatatan laporan keuangan.					
<b>Penyusunan atau pelaksanaan tahapan dalam proses akuntansi</b>						
10.	Akuntansi digunakan untuk mengukur, dan melaporkan informasi					
11.	Jurnal penyesuaian digunakan untuk mengoreksi akun-akun tertentu pada akhir					

	periode					
12.	Rekonsiliasi bank diperlukan untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan catatan bank.					
13.	Akuntansi dapat dikatakan sebagai suatu seni, sains, atau teknologi.					

### 3. Kualitas Aparatur Pemerintah

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
<b>Latar belakang pendidikan</b>						
1.	Latar belakang pendidikan harus berasal dari lulusan Akuntansi.					
2.	Minimal satf sub bagian keuangan/akuntansi merupakan lulusan d3 Akuntansi.					
<b>Peran, fungsi dan tanggungjawab</b>						
3.	Pegawai yang ahli dibidangnya ditempatkan di bagian yang sesuai dengan keahlian.					
4.	pegawai yang mempunyai keahlian dibidangnya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu.					
5.	saya telah mengerti peran dan fungsi dengan jelas dalam pengelolaan keuangan.					
<b>Pelatihan, keahlian dalam tugas</b>						
6.	Saya bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi yang ditetapkan.					
7.	saya telah mendapatkan pelatihan guna menunjang kemampuan bekerja dibidang akuntansi.					
8.	Instansi tempat saya bekerja telah melakukan sistem sarana dengan baik.					
<b>Pengalaman</b>						
9.	saya memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas dibidang akuntansi.					
10.	saya sudah berpengalaman dibidang akuntansi, sehingga dapat membantu saya mengurangi kesalahan dalam bekerja.					
11.	pegawai yang mempunyai prestasi kerja sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk					

	ditempatkan pada bagian lain yang sesuai.					
--	---	--	--	--	--	--

#### 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
<b>Pengolahan informasi</b>						
1.	Penerapan sistem akuntansi pada instansi tempat saya bekerja sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)					
<b>Pemanfaatan teknologi informasi</b>						
2.	pada instansi tempat saya bekerja sudah terpasang jaringan internet.					
3.	jaringan internet pada instansi tempat saya bekerja telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.					
4.	sub bagian keuangan tempat saya bekerja sudah menggunakan software aplikasi untuk melakukan tugas, seperti: Microsoft Excel, MYOB, dan sebagainya.					
<b>Pengolahan data</b>						
5.	proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja telah dilakukan dengan baik.					
6.	pada instansi tempat saya bekerja, pengolahan data transaksi keuangan telah menggunakan software yang sesuai dengan perundang-undangan.					

Sumber : Data Olahan, 2020



## Lampiran 2A

Tabulasi Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Responden	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah									Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	5	3	5	5	3	4	3	3	3	34
2	3	4	5	3	3	4	3	3	5	33
3	5	4	5	3	3	3	4	5	5	37
4	3	4	3	4	4	3	3	5	5	34
5	4	2	2	4	2	3	3	5	3	28
6	4	3	3	4	5	4	5	3	5	36
7	5	3	5	4	5	3	3	3	3	34
8	4	5	5	4	4	3	4	3	4	36
9	5	3	3	3	4	3	3	3	4	31
10	3	2	3	2	3	2	5	5	2	27
11	5	4	5	3	4	3	3	3	5	35
12	5	5	4	4	3	3	4	3	3	34
13	3	4	4	5	5	3	4	3	4	35
14	4	4	4	5	3	4	3	3	5	35
15	4	2	2	4	2	4	5	4	2	29
16	3	4	4	5	3	4	4	3	5	35
17	3	3	3	3	5	5	5	4	4	35
18	3	4	5	4	5	4	3	4	3	35
19	4	4	5	5	4	4	3	3	4	36
20	4	3	2	5	3	2	5	2	4	30
21	3	4	4	5	4	4	4	5	3	36
22	3	4	4	5	3	3	3	4	4	33
23	4	4	4	3	5	3	3	5	3	34
24	4	5	5	4	3	3	4	5	3	36
25	3	2	2	3	2	2	2	2	3	21
26	5	5	5	3	4	5	5	4	5	41
27	4	5	4	4	4	4	4	3	4	36
28	4	4	4	4	3	4	4	4	3	34
29	5	5	4	4	3	3	4	3	3	34
30	3	2	2	3	2	2	3	2	2	21

Dilanjutkan..

## Lanjutan

31	4	4	4	3	3	4	3	3	4	32
32	4	3	3	3	4	4	5	5	3	34
33	5	4	4	4	4	3	4	3	3	34
34	4	3	3	4	4	4	3	4	3	32
35	2	3	2	3	2	3	3	2	3	23
36	3	5	4	4	3	4	4	4	4	35
37	4	4	4	3	3	4	4	3	3	32
38	4	5	3	5	3	3	4	4	4	35
39	4	5	4	3	4	4	3	3	4	34
40	3	3	2	3	2	3	2	3	2	23
41	5	4	3	4	3	3	5	3	4	34
42	4	3	4	3	4	5	3	4	4	34
43	4	4	3	5	3	3	4	4	4	34
44	5	3	4	5	3	4	3	3	3	33
45	4	3	2	4	2	2	3	2	2	24
46	4	3	4	5	3	5	4	4	5	37
47	3	5	3	3	3	4	3	3	3	30
48	3	3	3	3	3	5	3	3	4	30

## Lampiran 2B

Tabulasi Jawaban Responden Variabel Pemahaman Akuntansi (X1)

Responden	Pemahaman Akuntansi													Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	3	3	4	5	5	4	2	4	3	3	5	3	3	47
2	5	5	3	3	5	5	3	3	5	5	5	3	3	53
3	5	5	4	5	3	3	5	3	4	2	2	4	2	47
4	4	5	4	4	4	4	3	3	5	4	4	3	4	51
5	3	3	2	3	2	2	2	3	3	2	5	3	3	36
6	5	5	5	4	4	5	3	5	5	4	5	4	4	58
7	4	5	3	4	4	5	4	4	4	3	3	4	4	51
8	5	5	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	5	53
9	3	5	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	5	50
10	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	2	35
11	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	48
12	3	4	3	3	4	3	4	4	2	2	4	4	4	44
13	3	4	4	3	3	4	4	4	3	5	4	4	4	49
14	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	3	3	45
15	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	3	3	4	37
16	3	4	3	4	5	5	4	4	4	3	4	4	2	49
17	4	5	3	5	4	4	5	4	4	3	4	4	5	54
18	5	4	3	5	4	4	3	5	3	3	3	5	4	51
19	5	4	3	5	3	4	3	4	3	5	4	4	2	49
20	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	35
21	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	46
22	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	5	3	48
23	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	4	46
24	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	49
25	3	2	3	3	2	3	2	3	3	3	3	3	2	35
26	3	5	4	3	4	3	4	4	3	5	4	3	5	50
27	3	3	3	4	4	3	4	4	4	5	3	3	3	46
28	3	3	5	3	3	4	4	4	3	3	3	4	5	47
29	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	3	5	5	48
30	3	2	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	5	38
31	3	4	4	3	4	4	3	4	3	5	4	2	3	46
32	4	4	5	3	5	3	3	4	4	5	5	3	4	52

Dilanjutkan ...

## Lanjutan

33	5	5	3	4	4	3	5	5	4	5	3	3	4	53
34	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	5	4	48
35	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	34
36	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	47
37	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	42
38	5	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	5	2	48
39	4	3	4	5	5	5	5	3	4	3	4	4	3	52
40	2	4	3	2	4	2	3	2	3	2	3	2	4	36
41	4	5	3	4	4	4	3	3	3	4	5	3	4	49
42	5	4	2	5	4	5	5	4	4	3	3	3	3	50
43	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	47
44	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	3	5	51
45	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	36
46	4	4	4	4	5	3	5	4	4	5	4	3	2	51
47	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	2	55
48	3	3	4	3	3	4	5	3	5	4	5	4	5	51

## Lampiran 2C

Tabulasi Jawaban Responden Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah (X2)

Responden	Kualitas Aparatur Pemerintah											Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	33
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	35
4	5	4	4	4	5	5	4	3	4	5	4	47
5	2	4	2	4	3	4	3	2	4	2	2	32
6	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	3	47
7	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	47
8	4	4	5	5	3	4	5	3	4	4	3	44
9	4	4	4	5	4	3	4	4	3	3	3	41
10	2	2	2	3	2	2	2	2	2	3	3	25
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
12	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	46
13	5	4	4	3	4	4	4	3	5	4	4	44
14	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	40
15	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	40
16	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	41
17	4	4	5	5	3	4	4	4	4	3	4	44
18	4	4	4	5	5	5	3	4	4	4	4	46
19	3	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	42
20	3	2	2	2	3	2	2	3	2	2	2	25
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	44
22	5	3	4	3	5	5	5	3	4	4	4	45
23	4	5	5	4	3	3	4	4	3	4	5	44
24	4	4	5	5	4	3	3	4	4	5	4	45
25	2	2	5	2	2	2	2	2	2	2	2	25
26	4	4	3	5	5	4	4	4	3	4	5	45
27	3	4	4	5	5	4	4	4	4	3	4	44
28	4	3	4	4	5	4	4	4	4	3	5	44
29	4	4	3	4	5	4	4	4	4	5	5	46
30	5	4	4	5	5	5	4	3	5	3	5	48
31	3	4	4	4	5	5	4	4	5	3	4	45
32	4	4	4	5	5	4	3	5	4	3	4	45

Dilanjutkan ...

## Lanjutan

33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	43
34	4	4	3	3	5	5	4	4	4	5	4	45
35	2	3	2	2	2	2	3	2	3	2	3	26
36	4	4	5	5	3	5	4	3	3	5	3	44
37	4	4	4	5	4	4	4	3	5	3	4	44
38	5	3	5	5	4	4	5	5	5	3	3	47
39	4	4	5	5	4	4	3	4	4	4	3	44
40	4	4	2	4	3	3	4	3	4	3	4	38
41	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	40
42	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	36
43	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	41
44	4	4	3	3	5	5	5	3	3	5	5	45
45	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	39
46	3	3	5	4	5	3	5	5	5	3	5	46
47	3	3	3	3	3	5	3	3	3	3	5	37
48	5	3	3	3	3	5	3	4	4	5	3	41

## Lampiran 2D

Tabulasi Jawaban Responden Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

Responden	pemanfaatan teknologi informasi							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	
1	4	3	3	4	3	3	5	25
2	5	5	5	5	5	5	5	35
3	5	5	5	5	4	5	5	34
4	5	5	5	4	5	4	5	33
5	5	5	3	5	4	5	5	32
6	5	5	4	5	3	5	5	32
7	5	5	5	4	4	4	5	32
8	4	4	5	5	5	4	5	32
9	4	5	5	4	5	4	5	32
10	5	3	5	5	3	3	3	27
11	4	4	5	5	4	4	5	31
12	5	4	4	4	5	4	5	31
13	4	5	4	5	4	5	4	31
14	5	5	5	4	3	5	4	31
15	4	3	3	5	3	4	5	27
16	4	5	4	5	4	4	4	30
17	4	5	5	4	4	5	5	32
18	5	4	4	3	5	5	4	30
19	4	4	5	4	4	4	5	30
20	3	3	3	2	4	2	3	20
21	5	5	4	3	4	4	5	30
22	4	4	5	4	4	4	5	30
23	5	4	4	4	3	4	5	29
24	5	5	4	3	4	4	4	29
25	2	2	3	4	3	2	3	19
26	4	5	4	4	4	4	4	29
27	5	5	3	4	2	5	4	28
28	5	4	4	3	4	3	5	28
29	3	4	4	4	5	5	3	28
30	2	2	3	3	2	2	3	17
31	4	4	4	4	3	4	4	27
32	4	4	4	4	3	4	4	27

Dilanjutkan ...

## Lanjutan

33	4	4	5	3	3	4	4	27
34	3	5	5	4	4	3	3	27
35	4	4	5	3	2	2	2	22
36	4	4	4	3	3	5	3	26
37	4	4	5	3	3	4	3	26
38	5	4	3	3	4	5	4	28
39	4	5	4	3	4	3	4	27
40	2	3	2	4	2	4	3	20
41	5	4	4	3	4	4	3	27
42	3	2	3	3	5	4	4	24
43	4	4	4	4	3	3	4	26
44	5	4	4	3	4	4	4	28
45	3	3	2	3	3	2	3	19
46	2	5	4	3	2	3	4	23
47	4	3	4	5	3	3	4	26
48	4	3	4	4	3	4	4	26



### Lampiran 3

Data Variabel Independen dan Dependen

Responden	DATA VARIABEL INDEPENDEN DAN DEPENDEN			
	Pemahaman Akuntansi	Kualitas Aparatur pemerintah	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kualitas Laporan Keuangan
1	39	41	25	34
2	39	47	35	33
3	43	47	34	37
4	54	44	33	34
5	38	30	32	28
6	55	50	32	36
7	55	43	32	34
8	53	44	32	36
9	50	41	32	31
10	30	30	27	27
11	52	40	31	35
12	54	36	31	34
13	52	41	31	35
14	46	39	31	35
15	47	30	27	29
16	49	43	30	35
17	53	45	32	35
18	55	42	30	35
19	50	43	30	36
20	30	30	20	30
21	51	39	30	34
22	53	40	30	36
23	52	38	29	21
24	52	42	29	41
25	30	30	19	36
26	53	42	29	34
27	50	40	28	34
28	53	38	28	21
29	56	38	28	32
30	56	30	17	34

Dilanjutkan...

## Lanjutan

31	50	41	27	34
32	52	45	27	32
33	50	46	27	23
34	54	39	27	35
35	30	30	22	32
36	51	40	26	35
37	50	36	26	32
38	56	41	28	35
39	51	45	27	34
40	44	30	20	32
41	47	42	27	34
42	42	44	24	34
43	48	40	26	34
44	53	43	28	33
45	45	30	19	24
46	54	46	23	37
47	47	48	26	30
48	50	42	26	30

### Lampiran 4A

#### Validitas Variabel Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

		Correlations									TOTA
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	L_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.178	.370**	.129	.159	.000	.190	-.004	.107	.425**
	Sig. (2-tailed)		.225	.010	.381	.280	1.000	.195	.980	.471	.003
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.2	Pearson Correlation	.178	1	.581**	.179	.274	.181	.123	.081	.378**	.631**
	Sig. (2-tailed)	.225		.000	.223	.059	.218	.404	.582	.008	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.3	Pearson Correlation	.370**	.581**	1	.153	.495**	.360*	.007	.204	.414**	.760**
	Sig. (2-tailed)	.010	.000		.300	.000	.012	.965	.165	.003	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.4	Pearson Correlation	.129	.179	.153	1	.029	.031	.094	-.033	.190	.355*
	Sig. (2-tailed)	.381	.223	.300		.847	.835	.526	.823	.195	.013
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.5	Pearson Correlation	.159	.274	.495**	.029	1	.319*	.198	.249	.342*	.640**
	Sig. (2-tailed)	.280	.059	.000	.847		.027	.178	.088	.017	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.6	Pearson Correlation	.000	.181	.360*	.031	.319*	1	.126	.215	.380**	.537**
	Sig. (2-tailed)	1.000	.218	.012	.835	.027		.392	.142	.008	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.7	Pearson Correlation	.190	.123	.007	.094	.198	.126	1	.279	.139	.424**
	Sig. (2-tailed)	.195	.404	.965	.526	.178	.392		.054	.347	.003
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

Dilanjutkan ..

## Lanjutan

Y.8	Pearson Correlation	-.004	.081	.204	-.033	.249	.215	.279	1	.054	.425**
	Sig. (2-tailed)	.980	.582	.165	.823	.088	.142	.054		.714	.003
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Y.9	Pearson Correlation	.107	.378**	.414**	.190	.342*	.380**	.139	.054	1	.629**
	Sig. (2-tailed)	.471	.008	.003	.195	.017	.008	.347	.714		.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.425**	.631**	.760**	.355*	.640**	.537**	.424**	.425**	.629**	1
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.013	.000	.000	.003	.003	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran 4B

### Validitas Variabel Pemahaman Akuntansi (X1)

Correlations														
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	X1.13	TOTAL_X1
X1.1 Pearson Correlation	1	.447**	.069	.598**	.299*	.371**	.243	.431**	.417**	.269	.200	.372**	-.091	.614*
X1.1 Sig. (2-tailed)		.001	.643	.000	.039	.010	.096	.002	.003	.064	.172	.009	.538	.000
X1.1 N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.2 Pearson Correlation	.447**	1	.245	.372**	.396**	.281	.338*	.399**	.389**	.299*	.214	.225	.186	.656*
X1.2 Sig. (2-tailed)	.001		.093	.000	.000	.053	.019	.000	.006	.039	.144	.123	.206	.000
X1.2 N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.3 Pearson Correlation	.069	.245	1	.066	.312*	.208	.205	.220	.330*	.387**	.330*	.264	.310*	.536*
X1.3 Sig. (2-tailed)	.643	.093		.655	.031	.156	.163	.133	.022	.007	.027	.072	.032	.000
X1.3 N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.4 Pearson Correlation	.598**	.372**	.069	1	.336*	.447**	.318*	.447**	.323*	.071	.188	.369**	-.088	.586*
X1.4 Sig. (2-tailed)	.000	.000	.643		.020	.000	.028	.000	.025	.633	.201	.010	.553	.000
X1.4 N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.5 Pearson Correlation	.299*	.396**	.312*	.336*	1	.371**	.276	.316*	.408**	.352*	.425**	.071	-.013	.612*
X1.5 Sig. (2-tailed)	.039	.000	.028	.028		.010	.106	.028	.000	.025	.000	.172	.933	.000
X1.5 N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

Dilanjutkan ...

## Lanjutan

	Sig. (2-tailed)	.039	.005	.031	.020		.009	.057	.029	.004	.014	.003	.634	.931	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
X1.6	Pearson Correlation	.371**	.281	.208	.447**	.371**	1	.258	.291*	.474**	.256	.306*	.238	.027	.603*	
	Sig. (2-tailed)	.010	.053	.156	.001	.009		.077	.045	.001	.079	.034	.104	.856	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
X1.7	Pearson Correlation	.243	.338*	.205	.318*	.276	.258	1	.307*	.404**	.261	-	.004	.285*	.154	.553*
	Sig. (2-tailed)	.096	.019	.163	.028	.057	.077		.034	.004	.073	.978	.049	.295	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
X1.8	Pearson Correlation	.431**	.399**	.220	.447**	.316*	.291*	.307*	1	.192	.399**	.212	.367*	.107	.623*	
	Sig. (2-tailed)	.002	.005	.133	.001	.029	.045	.034		.190	.005	.148	.010	.470	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
X1.9	Pearson Correlation	.417**	.389**	.330*	.323*	.408**	.474**	.404**	.192	1	.385**	.316*	.141	.134	.665*	
	Sig. (2-tailed)	.003	.006	.022	.025	.004	.001	.004	.190		.007	.028	.338	.364	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
X1.10	Pearson Correlation	.269	.299*	.387**	.071	.352*	.256	.261	.399**	.385**	1	.420**	.062	.052	.585*	
	Sig. (2-tailed)	.064	.039	.007	.633	.014	.079	.073	.005	.007		.003	.675	.723	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	

Dilanjutkan

## Lanjutan

X1.1	Pearson	.20	.21	.33	.18	.42	.30	-	.21	.31	.42	1	.12	.15	.536*
1	Correlation	0	4	0*	8	5**	6*	.004	2	6*	0**	1	4	4	*
	Sig. (2-tailed)	.172	.144	.022	.201	.003	.034	.978	.148	.028	.003		.401	.295	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.1	Pearson	.37	.22	.26	.36	.07	.23	.28	.36	.14	.06	.12	1	.10	.480*
2	Correlation	2**	5	4	9**	1	8	5*	7*	1	2	4	1	3	*
	Sig. (2-tailed)	.009	.123	.070	.010	.634	.104	.049	.010	.338	.675	.401		.484	.001
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.1	Pearson	-	.18	.31	-	-	.02	.15	.10	.13	.05	.15	.10	1	.308*
3	Correlation	.091	6	0*	.088	.013	7	4	7	4	2	4	3	1	*
	Sig. (2-tailed)	.538	.206	.032	.553	.931	.856	.295	.470	.364	.723	.295	.484		.033
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
TOT	Pearson	.61	.65	.53	.58	.61	.60	.55	.62	.66	.58	.53	.48	.30	1
AL_	Correlation	4**	6**	6**	6**	2**	3**	3**	3**	5**	5**	6**	0**	8*	
X1	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.033	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Lampiran 4C

#### Validitas Variabel Kualitas Aparatur Pemerintah (X2)

Correlations												
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.1 0	X2.1 1	TOTA L_X2
X2.1 Pearson Correlation	1	.469*	.374*	.392*	.454*	.584*	.567*	.440*	.468*	.578*	.365*	.760**
Sig. (2- tailed)		.001	.009	.006	.001	.000	.000	.002	.001	.000	.011	.000
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.2 Pearson Correlation	.469**	1	.310*	.564*	.425*	.461*	.545*	.359*	.361*	.421*	.434*	.702**
Sig. (2- tailed)	.001		.032	.000	.003	.001	.000	.012	.012	.003	.002	.000
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.3 Pearson Correlation	.374**	.310*	1	.568*	.214	.205	.411*	.487*	.347*	.228	.147	.580**
Sig. (2- tailed)	.009	.032		.000	.144	.163	.004	.000	.016	.120	.318	.000
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.4 Pearson Correlation	.392**	.564*	.568*	1	.389*	.339*	.407*	.540*	.479*	.185	.274	.689**
Sig. (2- tailed)	.006	.000	.000		.006	.018	.004	.000	.001	.208	.060	.000
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.5 Pearson Correlation	.454**	.425*	.214	.389*	1	.569*	.500*	.562*	.486*	.342*	.558*	.740**
Sig. (2- tailed)	.001	.003	.144	.006		.000	.000	.000	.000	.017	.000	.000
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.6 Pearson Correlation	.584**	.461*	.205	.339*	.569*	1	.478*	.253	.463*	.483*	.396*	.701**
Sig. (2- tailed)												
N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

Dilanjutkan ....



## Lanjutan

	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.163	.018	.000		.001	.083	.001	.001	.005	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.7	Pearson Correlation	.567**	.545*	.411*	.407*	.500*	.478*	1	.396*	.478*	.309*	.499*	.740**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.004	.004	.000	.001		.005	.001	.033	.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.8	Pearson Correlation	.440**	.359*	.487*	.540*	.562*	.253	.396*	1	.495*	.287*	.379*	.694**
	Sig. (2-tailed)	.002	.012	.000	.000	.000	.083	.005		.000	.048	.008	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.9	Pearson Correlation	.468**	.361*	.347*	.479*	.486*	.463*	.478*	.495*	1	.203	.302*	.675**
	Sig. (2-tailed)	.001	.012	.016	.001	.000	.001	.001	.000		.166	.037	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.10	Pearson Correlation	.578**	.421*	.228	.185	.342*	.483*	.309*	.287*	.203	1	.291*	.583**
	Sig. (2-tailed)	.000	.003	.120	.208	.017	.001	.033	.048	.166		.044	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.11	Pearson Correlation	.365*	.434*	.147	.274	.558*	.396*	.499*	.379*	.302*	.291*	1	.619**
	Sig. (2-tailed)	.011	.002	.318	.060	.000	.005	.000	.008	.037	.044		.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
TOTAL_X2	Pearson Correlation	.760**	.702*	.580*	.689*	.740*	.701*	.740*	.694*	.675*	.583*	.619*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Lampiran 4D

#### Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

		Correlations							TOTAL_
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.514**	.385**	.198	.340*	.531**	.494**	.744**
	Sig. (2-tailed)		.000	.007	.177	.018	.000	.000	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X3.2	Pearson Correlation	.514**	1	.505**	.196	.280	.533**	.388**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.182	.054	.000	.006	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X3.3	Pearson Correlation	.385**	.505**	1	.237	.318*	.233	.266	.622**
	Sig. (2-tailed)	.007	.000		.105	.028	.110	.068	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X3.4	Pearson Correlation	.198	.196	.237	1	.101	.353*	.440**	.521**
	Sig. (2-tailed)	.177	.182	.105		.495	.014	.002	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X3.5	Pearson Correlation	.340*	.280	.318*	.101	1	.360*	.428**	.606**
	Sig. (2-tailed)	.018	.054	.028	.495		.012	.002	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X3.6	Pearson Correlation	.531**	.533**	.233	.353*	.360*	1	.438**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.110	.014	.012		.002	.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48
X3.7	Pearson Correlation	.494**	.388**	.266	.440**	.428**	.438**	1	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000	.006	.068	.002	.002	.002		.000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48

Dilanjutkan ...

lanjutan

TOTAL_	Pearson								
X3	Correlation	.744**	.733**	.622**	.521**	.606**	.742**	.729**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran 5

1. Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan (Y)

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.700	9

2. Uji Reliabilitas Pemahaman AKuntansi (X1)

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.815	13

3. Uji Reliabilitas Kualitas Aparatur Pemerintah (X2)

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.881	11

4. Uji Reliabilitas Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.799	7

**Lampiran 6**

## Uji Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Akuntansi	48	34	58	46.73	6.056
Kualitas Aparatur Pemerintah	48	25	48	41.08	6.195
Pemanfaatan Teknologi Informasi	48	17	35	27.71	4.089
Kualitas Laporan Keuangan	48	21	41	32.60	4.296
Valid N (listwise)	48				

## Lampiran 7

### Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.53200667
Most Extreme Differences	Absolute	.063
	Positive	.042
	Negative	-.063
Test Statistic		.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

#### 2. Uji Multikolonieritas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics		
	B	Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.082		
Pemahaman AKuntansi	.308	.480	2.084
Kualitas AParatur Pemerintah Pemanfaatan	.102	.651	1.537
Teknologi Informasi	.395	.660	1.516

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah

## Lampiran 8

### Analisis Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.082	3.316		.929	.358
Pemahaman Akuntansi	.308	.091	.434	3.387	.001
Kualitas Aparatur Pemerintah	.102	.076	.147	1.334	.189
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.395	.115	.376	3.435	.001

a. Dependent Variable: Kaulitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## Lampiran 9

### Uji Hipotesis

#### a. Uji Ststistik (Uji Parsial)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3.082	3.316		.929	.358
Pemahaman Akuntansi	.308	.091	.434	3.387	.001
Kualitas Aparatur Pemrintah	.102	.076	.147	1.334	.189
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.395	.115	.376	3.435	.001

a. Dependent Variable: Kaulitas Laporan Keuangan Pemrintah Daerah



**Lampiran 10**

## Koefisien Determinasi






**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.808 <sup>a</sup>	.653	.629	2.617


a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Aparatur Pemerintah, Pemahaman AKuntansi






## Lampiran 11






## Tanda izin pengambilan data penelitian



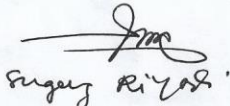


NO	KETERANGAN	TANDA PENGAMBILAN
1.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM	
2.	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertenakan	
3.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
4.	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	
5.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	

6.	Dinas Komunikasi dan Informatika	
7.	Dinas Perhubungan	
8.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	

11.	Dinas Lingkungan Hidup	
12.	Dinas PPPA dan PPKB	
13.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
14.	Dinas Sosial	
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	

16.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruangdan Pertahanan	
17.	Dinas Pekerjaan Umum	
18.	Dinas Kesehatan	
19.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
20.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	

21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
22.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	
23.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	
34.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
35.	Inspektorat Daerah	

36.	Sekretariat Daerah	
37.	Sekretariat DPRD	
38.	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas	
39.	Kecamatan Adiwerna	
30.	Kecamatan Bojong	

31.	Kecamatan Bumijawa	  <b>AGUS ASTUTI</b> NIP. 19680712006709105 1
32.	Kecamatan Dukuhturi	An. Camat Dukuhturi Sekretaris Camat  <b>SUHANTO, SH, M.SI</b> NIP. 19640104 199303 1 007
33.	Kecamatan Dukuhwaru	  <b>ESTI NURWKTI, SIP.MM</b> NIP. 19720615 199403 2 008
34.	Kecamatan Jatinegara	
35.	Kecamatan Kedungbanteng	  <b>SIS AENTI, SIP.</b> NIP. 19660524 198603 2 004



36.	Kecamatan Kramat	
37.	Kecamatan Lebaksiu	
38.	Kecamatan Margasari	
39.	Kecamatan Pagerbarang	
40	Kecamatan Pangkah	<p>Mengetahui:</p> 


36.	Kecamatan Kramat	 <p><b>FAJAR SUBECHE, S.IP.MM</b> NIP. 19720712 199403 1 007</p>
37.	Kecamatan Lebaksiu	 <p><b>AL. u.</b></p>
38.	Kecamatan Margasari	 <p><b>MENGETAHUI</b> <b>KECAMATAN PAGERBARANG</b></p>
39.	Kecamatan Pagerbarang	 <p><b>HARIO PRABOWO, S.Sos</b> Pembina (IV/a) NIP. 19670812 198803 1 009</p>
40.	Kecamatan Pangkah	<p>Mengetahui:</p>  <p><b>SUCIATIO, S.AP</b> NIP. 19650510 200012 1 001</p>

41	Kecamatan Slawi	
42	Kacamatan Talang	
43	Kecamatan Suradadi	
44	Kecamatan Tarub	
45	Kecamatan Warureja	
46	Kecamatan Balapulang	<p data-bbox="933 1249 1226 1302">KOMARIAN INDRIANI, SIP NIP. 19760503199603 2 003</p> 

47.	RSUD Dr. Soeselo	
48.	RSUD Suradadi	

## Lampiran 12

### Surat Izin Penelitian



**YAYASAN PENDIDIKAN PANCASAKTI TEGAL**  
**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 PROGDI : MANAJEMEN, AKUNTANSI, DAN MANAJEMEN PAJAK  
 (STATUS TERAKREDITASI)  
 Jl. Halmahera Km. 1 Telp. (0283) 355720 Tegal


---

Nomor : **166/K/E/FEB/UPS/V/2020** Tegal, 08 Mei 2020  
 Lampiran : -  
 Perihal : **Permintaan Data dan Ijin Penelitian**  
 Kepada : Yth. **Kepala OPD se Kab. Tegal**  
           Di – Kab. Tegal

Dengan hormat, salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis mahasiswa diwajibkan mengadakan penelitian sebagai bahan menyusun skripsi. Berkenaan dengan hal itu, mohon berkenaan Bapak membantu memberi data yang diperlukan dalam penelitian tersebut kepada mahasiswa :

N a m a : **Muniifah Anaan**  
 NPM : 4316500124  
 Program Studi : Akuntansi  
 Judul Skripsi : Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Kualitas Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal)

Atas bantuan dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih,



**Dekan**  
**Dr. Dien Noviany R., S.E., M.M., Akt., CA**  
 NIDN. 0628117502



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Gajah Mada No. 2 ☎ ( 0283 ) 491270  
Slawi

Kode Pos 52412

**REKOMENDASI RISET / PENELITIAN**

NOMOR : 072 / 04 / 58795 / 2020

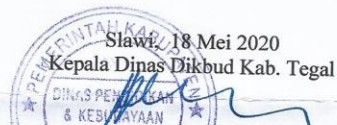
Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal Nomor : 166/K/E/FEB/UPS/V/2020 tanggal 8 Mei 2020 Tentang Permintaan Data dan Ijin Penelitian. Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal memberikan **REKOMENDASI** kepada :

N a m a	:	<b>MUNIFAH ANAAN</b>
NIM	:	4316500124
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Akademi/Universitas	:	Universitas Pancasakti Tegal
Judul Tugas Akhir	:	Ijin Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Dengan Judul "PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, KUALITAS APARATUR PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL"
Penanggungjawab	:	-
Dosen Pembimbing	:	-
Alamat Rumah	:	-

untuk melakukan Riset/Penelitian/Observasi/ Permohonan Data dalam rangka Penyusunan Skripsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Riset / Penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- Pelaksanaan Riset / Penelitian agar dikoordinasikan sendiri dengan Kepala Bidang yang membidangi sesuai dengan tujuan penelitian;
- Yang berkaitan dengan biaya / dana pelaksanaan riset / penelitian menjadi tanggungjawab pribadi pelaksana Riset / Penelitian tersebut diatas;
- Setelah kegiatan dimaksud selesai, agar melaporkan hasil Riset / Penelitian kepada Kepala Dinas Dikbud Kab. Tegal;
- Rekomendasi ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2020

Demikian surat Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**AKHMAD WAS'ARI, S.Pd,MM**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19640310 198608 1 001

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth ;  
1. Bupati Tegal (sebagai lapora)  
2. Ybs:



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

ALAMAT : Jalan Dr. SOETOMO No. 1 SLAWI  
 TELEPON (0283) 491668-491764-491765 FAX. (0283) 491670  
 KODE POS SLAWI 52417

Slawi, 17 September 2019

Nomor : 800/17/4864/2019  
 Lampiran :  
 Perihal : Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

Kepada  
 Yth. 1. Kepala OPD se Kab. Tegal  
 2. Camat se Kab. Tegal

Berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan hasil rapat yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 di Ruang Rapat Bagian Pembangunan Setda Kab. Tegal dalam rangka membahas penanggungjawab penerbitan SKP di Kabupaten Tegal, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu di keluarkan Surat Keterangan Penelitian sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian.
2. Penerbitan Surat Keterangan Penelitian di laksanakan oleh DPMPSTP Kabupaten Tegal setelah berkoordinasi dengan Kantor Kesbangpol Kab. Tegal, rekomendasi dari Kantor Kesbangpol Kab. Tegal setelah dilakukan pengkajian terhadap dampak negatif yang diperkirakan akan timbul.
3. Penelitian yang dikecualikan berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tidak perlu memiliki Surat Keterangan Penelitian, sehingga Perangkat Daerah/Instansi yang menjadi lokus penelitian, tanpa harus menunjukkan kepemilikan Surat Keterangan Penelitian dan menuntut peneliti memiliki Surat Keterangan Penelitian.
4. Penelitian yang dikecualikan berdasarkan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tidak perlu memiliki Surat Keterangan Penelitian adalah sebagai berikut :
  - a. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri.
  - b. Penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Bpk/Ibu/Sdr berkenan memperbanyak dan mensosialisasikan kepada pejabat dan pegawai di lingkungan kerja kerja Bpk/Ibu/Sdr serta membantu menyebarkan kepada masyarakat umum.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

a.n. **BUPATI TEGAL**  
 Sekretaris Daerah


**dr. WIDODO JOKO MULYONO, M. Kes., MM**  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 19630919-199601 1 001

		<b>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL</b> <b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b> Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Telp. (0283) 6197673 Fax. (0283) 6197503 SLAWI 52416			13 080 <b>LEMBAR DISPOSISI</b>	
Klasifikasi			Derajat			
Rahasia	Terbatas	Biasa	Sangat Segera	Segera	Biasa	
No. Agenda : 080			Tanggal Terima : 13/5/2020			
No. Surat : 166/K/E/ FEB / UPS / 4 / 2020			Tanggal Surat : 12/5/2020			
Asal Surat : UPS - Tegal			Keterangan :			
Perihal : Permisihan Data dan penelitian						
DITERUSKAN KEPADA YTH.			ISI DISPOSISI			
1. Sekretaris		✓		Fasilitasi		
a. Ka. Sub. Bagian Kepegawaian						
b. Ka. Sub. Bagian Keuangan		✓				
c. Ka. Sub. Bagian Umum						
2. Kepala Bidang Jakon, Laboratorium & Monev						
3. Kepala Bidang Jalan						
4. Kepala Bidang Jembatan						
5. Kepala Bidang Sumber Daya Air						
Catatan/Pertimbangan/Laporan Sekretaris : 7/13/05 - Dan F. F. F.						

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
KARTU SURAT MASUK

Index	Kode 050	Nomor Urut 880
Isi Ringkas Permisihan data dan ijin penelitian		
Dari UPS. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis)		
Tanggal Surat 12/5/2020	Nomor Surat 166/K/E/ FEB / UPS / 4 / 2020	Lampiran
Pengolah	Tgl Diteruskan	Tanda Terima
Catatan 0. 13/05		



 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL</b> <b>DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, TATA RUANG</b> <b>DAN PERTANAHAN</b> Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 13 Slawi 52416		
Surat dari : <i>OPS Tegal</i>	Diterima Tanggal : <i>15-5-2020</i>	
Tgl. Surat : <i>8-5-2020</i>	Nomor Agenda : <i>0539</i>	
No. Surat : <i>166/K/16/FEB/OPS/VI/2020</i>	Diteruskan Kepada	
Perihal : <i>Permintaan Data dan Isin Penelitian</i>	1. Sekretaris	
	a. Ka. Subag Perencanaan dan Keuangan	
	b. Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	<input checked="" type="checkbox"/>
	2. Ka. Bid. Pembangunan Gedung	
	a. Kasi Perencanaan Teknis Bangunan Gedung	
	b. Kasi Bangunan Gedung	
	c. Kasi Penataan Bangunan dan Lingkungan	
	3. Ka. Bid. Tata Perumahan dan Permukiman	
	a. Kasi Perumahan dan Permukiman	
	b. Kasi Pencegahan Penanganan Perumahan dan Permukiman Kumuh (P4K)	
	c. Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	
	4. Ka. Bid. Pertanahan dan Tata Ruang	
	a. Kasi Perencanaan Tata Ruang	
b. Kasi Pertanahan		
c. Kasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
ISI DISPOSISI : <i>- Mutu di alomoder 14/5</i>		
Keterangan	Tanda Tangan / Paraf yang Menerima :	

KARTU SURAT MASUK KABUPATEN TEGAL	Index	Kode <i>166</i>	Nomor Urut
	Isi Ringkas	<i>Permintaan Data dan Isin Penelitian</i>	
	Dari	<i>OPS Tegal</i>	
	Tanggal Surat	Nomor Surat	Lampiran
	<i>8-5-2020</i>	<i>166/K/16/FEB/OPS/VI/2020</i>	
	Pengolah	Tgl. Diteruskan	Tanda Terima
	Catatan		



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Telp. (0283) 491480 Slawi 52401

Surat dari : UPS - Regor Fak. Ekonomi dan Bisnis  
Tanggal Surat : 08 Mei '20  
Nomor Surat : 166 / K / E / FEB / UPS / V / 2020  
Diterima Tanggal : 14 Mei '20  
Nomor Agenda : 0578

Kepada

- 1. Sekretaris /
- 2. Kabid Perikanan Tangkap
- 3. Kabid Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan
- 4. Kabid Peternakan

Isi Disposisi :

- Pertimbangan

14/5/20



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 9 Telp. (0283) 491480 Slawi 52401

SEKRETARIS

Surat dari : UPS - Regor  
Tanggal Surat : 8 Mei '20  
Nomor Surat : 166 / K / E / FEB / UPS / V / 2020  
Diterima Tanggal : 14 Mei '20  
Nomor Agenda : 0578

Kepada

- 1. Subbag Umum dan Kepegawaian
- 2. Subbag Keuangan
- 3. Subbag Perencanaan


Isi Disposisi :

- Utuk di isi kuesioner  
di monev dan dikumpul-  
kan di Subbag Umpeg.

\* Mba Jolly

- Tolong di keri dan  
di serahkan ke Umpeg  
- TMS p. 18/5-20

19/5/20

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL</b> <b>BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>(BP2D)</b> Jl. A. Yani No. 30 Slawi email : bp2dtegakab@gmail.com Kode Pos 52412	
<b>LEMBAR DISPOSISI</b>	
Surat dari	: <i>LPS. Tegal</i> Diterima Tanggal <i>19-5-20</i>
Tanggal Surat	: <i>20-5-20</i> Nomor Agenda : <i>166/0374</i>
Nomor Surat	: <i>166/R/E/PPD</i>
Perihal	: <i>permintaan data dan ijin penelitian</i>
19/5 <b>ISI DISPOSISI</b> <i>p. Sekeloa / Umpeg</i> <i>partai pbs g klp</i> <i>ky</i> <i>05</i>	
<b>Keterangan :</b>	Tanda tangan / Paraf Yang menerima :

### Lampiran 13

#### Daftar Organisasi Perangkat Daerah se Kabupaten Tegal

No	Unit Kerja
1.	Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM
2.	Dinas Kelautan Perikanan dan Pertenakan
3.	Dinas Kearsipan dan Pepustakaan
4.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
5.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
6.	Dinas Komunikasi dan Informatika
7.	Dinas Perhubungan
8.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
9.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
11.	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Dinas PPPA dan PPKB
13.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
14.	Dinas Sosial
15.	Satuan Polisi Pamong Praja
16.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertahanan
17.	Dinas Pekerjaan Umum
18.	Dinas Kesehatan
19.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
22.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang
23.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25.	Inspektorat Daerah
26.	Sekretariat Daerah
27.	Sekretariat DPRD
28.	Badan Kesbangpol dan Linmas
29.	Kecamatan Adiwerna
30.	Kecamatan Bojong
31.	Kecamatan Bumijawa
32.	Kecamatan Dukuhturi
33.	Kecamatan Dukuhwaru
34.	Kecamatan Jatinegara
35.	Kecamatan Kedungbanteng

Dilanjutkan ...

Lanjutan

36.	Kecamatan Kramat
37.	Kecamatan Lebaksiu
38.	Kecamatan Margasari
39.	Kecamatan Pagerbarang
40.	Kecamatan Pangkah
41.	Kecamatan Slawi
42.	Kecamatan Suradadi
43.	Kecamatan Talang
44.	Kecamatan Tarub
45.	Kecamatan Warureja
46.	Kecamatan Balapulang
47.	RSUD Dr. Soeselo
48.	RSUD Suradadi